



**MANFAAT ANALISIS KELAYAKAN USAHA CALON
DEBITUR TERHADAP RISIKO KREDIT MACET
PADA PT. BANK DIPO INTERNASIONAL**

Skripsi

Dibuat Oleh:

**Renatha Patrizia
022101287**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

FEBRUARI 2006

**MANFAAT ANALISIS KELAYAKAN USAHA CALON
DEBITUR TERHADAP RISIKO KREDIT MACET
PADA PT BANK DIPO INTERNASIONAL**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan
Bogor


Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



(Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, MM., SE., Ak)

Ketua Jurusan



(Ketut Sunarta, Drs., Ak., MM)

**MANFAAT ANALISIS KELAYAKAN USAHA CALON
DEBITUR TERHADAP RISIKO KREDIT MACET
PADA PT BANK DIPO INTERNASIONAL**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada Hari: Sabtu Tanggal 04 Maret 2006

Renatha Patrizia
022101287

Menyetujui

Dosen Penilai



(Hj. Fazariah Mahruzar, Dra., Ak., MM)

Pembimbing



(Dr. H. Hari Gursida, Drs., Ak., MM)

Co. Pembimbing



(Nur Abdillah, SE., Ak., MM)

ABSTRAK

RENATHA PATRIZIA. NPM 022101287. Manfaat Analisis Kelayakan Usaha Calon Debitur Terhadap Risiko Kredit Macet pada PT. Bank Dipo Internasional. Dibawah Bimbingan: HARI GURSIDA dan NUR ABDILLAH

Dalam peranannya sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Kegiatan utama bank selain menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Tujuan dari pemberian kredit ini adalah untuk membantu masyarakat yang memerlukan dana baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Pemberian kredit merupakan kegiatan yang tingkat risikonya sangat tinggi dan dapat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank tersebut. Risiko kredit yang timbul akan bermacam-macam. Hal ini disebabkan oleh macam-macam jenis kredit yang diberikan oleh bank yang sesuai dengan kebutuhannya masing-masing calon debitur.

Dari alasan tersebut, maka dalam kegiatan pemberian kredit perlu dilakukannya analisis terhadap kelayakan usaha calon debitur. Hal ini bertujuan untuk menghindari dan untuk meminimalkan risiko kredit macet yang akan dihadapi. Dalam melakukan analisis kelayakan usaha calon debitur, pihak bank perlu melakukan penilaian terhadap beberapa aspek yang mempengaruhi kelayakan usaha tersebut serta penilaian terhadap laporan keuangan calon debitur selama tiga tahun terakhir. Hal ini perlu dilakukan oleh pihak bank dengan tujuan kredit yang diberikan tidak mengalami masalah dan dapat diterima kembali dimasa yang akan datang.

Alasan dan tujuan penulis memilih judul tersebut dalam penulisan skripsi adalah untuk melihat manfaat dan dampak yang ditimbulkan oleh analisis kelayakan usaha calon debitur terhadap risiko kredit macet. Serta dapat melihat hambatan yang dihadapi oleh bank dalam melakukan analisis kelayakan usaha calon debitur. Hal ini bertujuan untuk melihat manfaat dan pengaruh terhadap tingkat kredit macet yang dialami oleh bank tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus, yaitu dengan mempelajari masalah yang terjadi pada objek penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif Eksploratif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, penyebab terjadinya masalah tersebut serta cara penyelesaian masalah tersebut dengan menjabarkan kondisi yang terjadi.

Analisis kelayakan usaha calon debitur pada PT Bank Dipo Internasional sudah cukup baik namun masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan dan hambatan yang terjadi dalam melakukan analisis kelayakan usaha. Penyimpangan yang terjadi biasanya karena pihak intern bank dalam melakukan penilaian terhadap aspek yang mempengaruhi kelayakan usaha serta dalam penilaian laporan keuangan calon debitur yang tidak disiplin dalam mematuhi peraturan perkreditan yang berlaku. Selain itu, kredit macet dapat disebabkan oleh penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya sistem pengawasan dan informasi kredit, penyimpangan dalam pemakaian fasilitas kredit serta kegagalan usaha debitur.

Penyimpangan tersebut sangat mempengaruhi tingkat risiko kredit yang dihadapi oleh PT. Bank Dipo Internasional. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa analisis kelayakan usaha calon debitur pada PT. Bank Dipo Internasional sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam menyelesaikan program studi jenjang strata satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

Penyusunan skripsi ini dapat berjalan baik karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Mama dan Abie yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat dengan penuh rasa cinta, keikhlasan dan kesabaran.
2. Bapak Edi Mulyadi Soepardi Drs., Ak., MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Bapak Ketut Sunarta Drs., Ak., MM., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
4. Ibu Ellyn Octavianty, SE., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
5. Bapak DR. H. Hari Gursida Drs., Ak., MM selaku Dosen Pembimbing utama Skripsi.
6. Bapak Nur Abdillah Ak., MM selaku Dosen Co. Pembimbing Skripsi.
7. Bapak Hari Muharam, SE., selaku Dosen Wali.
8. Seluruh Dosen dan Staf di Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor.

9. Seluruh Dosen pada Universitas Pakuan, Bogor.
10. Bapak Budiarto selaku Komisaris PT. Bank Dipo Internasional.
11. Bapak Wardoyo selaku Pimpinan Bagian Analisis Kredit pada PT. Bank Dipo Internasional.
12. Bapak Rony selaku Pimpinan Bagian Penanganan Kredit Macet pada PT. Bank Dipo Internasional.
13. Bapak Mujianto, selaku Personalia Bank Dipo Internasional
14. Seluruh karyawan PT. Bank Dipo Internasional.
15. Teman-teman seperjuangan Srie, Nova, Dian, Indah, Edianto, Bambang Rujito (Mario) kalian adalah temen-teman yang terbaik.
16. Sohibku Rita, Elin dan Rita Gianti, E2-ngthanks yach buat semuanya semoga persahabatan kita untuk selamanya.
17. Specially thanks for Wawan Kurniawan and Paulus Habel Anderias Therik thanks guys for everything.
18. Teman-teman kelas A-F angkatan 2001 yang tidak disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya atas segala kenikmatan yang telah diberikan selama ini dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya, Amin.

Bogor, Februari 2006

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian.....	8
1.5.1. Kerangka Pemikiran	8
1.5.2. Paradigma Penelitian	15
1.6. Hipotesis Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Manajemen Keuangan.....	17
2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan	17
2.1.2. Tujuan Manajemen Keuangan	18
2.1.3. Fungsi Manajemen Keuangan.....	19
2.2. Analisis Kelayakan Usaha Calon Debitur.....	20
2.2.1. Pengertian Analisis Kelayakan Usaha	20
2.2.2. Tujuan Analisis Kelayakan Usaha.....	21
2.2.3. Tahapan Kelayakan Usaha	22
2.2.4. Aspek yang mempengaruhi Analisis Kelayakan usaha	22
2.2.5. Penilaian terhadap Kinerja Keuangan	24
2.2.6. Metode Penilaian Kinerja Keuangan.....	25
2.3. Risiko Kredit Macet.....	27
2.3.1. Pengertian Kredit.....	27
2.3.2. Jenis-jenis Kredit.....	29
2.3.3. Pengertian Kredit Macet.....	32
2.3.4. Faktor Penyebab Kredit Macet.....	33
2.3.5. Pengertian Risiko Kredit.....	35
2.3.6. Jenis-jenis Risiko Kredit.....	35
2.3.7. Upaya Penyelamatan Kredit Macet.....	36
2.3.8. Akibat Kredit Macet	38
2.4. Manfaat Analisis Kelayakan Usaha Calon Debitur terhadap Risiko Kredit Macet.....	39

BAB III	OBJEK DAN METODE PENELITIAN	
	3.1. Objek Penelitian	41
	3.2. Metode Penelitian	41
	3.2.1. Desain Penelitian	41
	3.2.2. Operasionalisasi Variabel.....	43
	3.2.3. Metode Penarikan Sampel	44
	3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data	44
	3.2.5. Metode analisis	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	4.1. Gambaran Umum Perusahaan.....	46
	4.1.1. Sejarah dan Perkembangan Perusahaan.....	46
	4.1.2. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang.....	47
	4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha.....	58
	4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	59
	4.2.1. Analisis Kelayakan Usaha Calon Debitur pada PT. Bank Dipo Internasional	59
	4.2.2. Risiko Kredit Macet pada PT. Bank Dipo Internasional	72
	4.2.3. Manfaat Analisis Kelayakan Usaha Calon debitur terhadap Risiko Kredit Macet pada PT. Bank Dipo Internasional	81
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	5.1. Simpulan.....	84
	5.1.1. Simpulan Umum.....	84
	5.1.2. Simpulan Khusus.....	84
	5.2. Saran.....	86

JADWAL PENELITIAN
 DAFTAR PUSTAKA
 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1: Laporan Kolektibilitas Kredit Tahun 2000.....	4
Tabel 2: Laporan Kolektibilitas Kredit Tahun 2001.....	4
Tabel 3: Laporan Kolektibilitas Kredit Tahun 2002.....	5
Tabel 4: Operasionalisasi Variabel.....	43
Tabel 5: Kredit yang Bermaslah Tahun 2002.....	75
Tabel 6: Laporan Prosentase Kredit Macet.....	80

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1: Paradigma Penelitian.....	15

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Pernyataan Riset**
- Lampiran 2: Surat Pernyataan**
- Lampiran 3: Struktur Organisasi**
- Lampiran 4: Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya Tahun 2001-2000**
- Lampiran 5: Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya Tahun 2002-2001**
- Lampiran 6: Perhitungan Laba rugi dan Saldo laba Konsolidasi Tahun 2001-2000**
- Lampiran 7: Perhitungan Laba rugi dan Saldo laba Konsolidasi Tahun 2002-2001**
- Lampiran 8: Laporan Komitmen dan Kontinjensi Konsolidasi Tahun 2001-2000**
- Lampiran 9: Laporan Komitmen dan Kontinjensi Konsolidasi Tahun 2002-2001**
- Lampiran 10: Neraca Konsolidasi Tahun 2001-2000**
- Lampiran 11: Neraca Konsolidasi Tahun 2002-2001**
- Lampiran 12: Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Tahun 2001-2000**
- Lampiran 13: Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Tahun 2002-2001**
- Lampiran 14: Perhitungan Rasio Keuangan Tahun 2001-2000**
- Lampiran 15: Perhitungan Rasio Keuangan Tahun 2002-2001**
- Lampiran 16: Penggolongan Kualitas kredit**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Kegiatan utama bank selain menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Kegiatan pemberian kredit dalam istilah bank sering juga disebut dengan alokasi dana. Pengalokasian dana dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan bank.

Arti lain dari Alokasi dana adalah “menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan”. (Kasmir, 2000, 90). Pemberian kredit kepada nasabah merupakan kegiatan untuk menghasilkan keuntungan bagi bank, tetapi juga merupakan kegiatan bank yang paling tinggi tingkat risikonya.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. (UU Perbankan No.10 Th 1998)

Kredit dalam usaha bank merupakan kegiatan yang sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan bank tersebut. Pemilihan debitur yang benar-benar menguntungkan dalam pemberian kredit dan dana masyarakat sangat menunjang kelancaran fungsi usaha kedua belah pihak antara pihak bank dengan pihak debitur.

Oleh karena itu dalam pemberian kredit, bank harus melakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan meminimalisasikan risiko kredit macet. Kelayakan usaha calon debitur mencakup latar belakang perusahaan, prospek usahanya, serta faktor-faktor yang lainnya. Tujuan kelayakan usaha calon debitur ini dilakukan adalah agar bank merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman.

Adapun pengertian dari kelayakan usaha calon debitur adalah “suatu penelitian tentang layak atau tidaknya suatu usaha atau proyek bisnis itu dilaksanakan”. (Umar, 2003, 12).

Tujuan dilakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur adalah untuk menilai kelayakan suatu gagasan usaha dan hasil dari penilaian kelayakan ini merupakan suatu pertimbangan apakah usaha tersebut dapat diterima atau ditolak. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan meminimalisasikan risiko terjadinya kredit macet.

Sebenarnya banyak pemberi pinjaman, menegaskan bahwa sedikit sekali peminjam yang tidak mampu membayar kewajiban mereka. Mereka mengatakan bahwa sebagian besar pinjaman dilakukan dengan itikad baik yaitu dengan melunasi pinjamannya dengan lancar.

Namun kemampuan peminjam untuk melunasi kreditnya mungkin mengalami perubahan setelah pemberian kredit. Hal ini menjadi penyebab mengapa sebagian kredit menimbulkan persoalan dalam penagihannya.

Persoalan penagihannya mungkin juga muncul karena kesalahan prosedur dalam bank itu sendiri, atau karena ketidak mampuan pejabat kredit dalam melakukan analisis kredit yang baik, keputusan yang terburu-buru dalam pemberian kredit tanpa memiliki informasi kredit yang memadai.

Arah kredit bermasalah yang dapat memicu terjadinya kredit macet inilah yang memaksa bank harus ekstra hati-hati dalam kegiatan pemberian kredit. Kredit macet mempunyai dampak yang buruk terhadap tingkat likuiditas bank dan meningkatkan kemungkinan rugi. Kerugian mengurangi kemampuan bank dalam melayani nasabah dan menguras kekuatan keuangan bank tersebut.

Disinilah letak pentingnya kelayakan usaha calon debitur untuk membantu pihak bank dalam meminimalisasikan kredit macet tersebut, serta risiko kredit macet; yaitu risiko yang timbul karena ketidak mampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya tersebut yang telah jatuh tempo.

Sebagai salah satu bank swasta, Bank Dipo merupakan sebuah bank yang menerima simpanan dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan memberikan kredit jangka pendek, menengah dan jangka panjang untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan usaha serta untuk keperluan investasi.

Bank Dipo, dalam hal ini telah melaksanakan kelayakan usaha calon debitur semaksimal mungkin, namun dalam prakteknya masih saja mengalami kendala dalam penanganannya.

Pada laporan keuangan Bank Dipo tahun 2000-2002 mengalami kredit yang kurang lancar, diragukan serta macet. Data tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.
Laporan Kolektibilitas Kredit Tahun 2000
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Kredit pihak ketiga			
	a. KUK	125	4	-
	b. Kredit Properti	-	-	-
	i. direstrukturisasi	-	-	338
	ii. tidak direstrukturisasi	232	-	9.858
	c. Kredit lain direstrukturisasi	3.684	-	-
	d. Lainnya	4.180	-	1.534

Sumber: PT. Bank Dipo Internasional

Tabel 2.
Laporan Kolektibilitas Kredit Tahun 2001
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Kredit pihak ketiga	1.718	3.251	15.254
	a. KUK	364	-	-
	b. Kredit Properti	-	-	10.196
	i. direstrukturisasi	-	-	338
	ii. tidak direstrukturisasi	-	-	9.858
	c. Kredit lain direstrukturisasi	724	2.787	50
	d. Lainnya	630	464	5.008

Sumber: PT. Bank Dipo Internasional

Tabel 3.
Laporan Kolektibilitas Kredit Tahun 2002

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1.	Kredit pihak ketiga	3.141	2.469	8.319
	a. KUK	533	9	10
	b. Kredit Properti	-	-	6.358
	i. direstrukturisasi	-	-	-
	ii. tidak direstrukturisasi	-	-	6.358
	c. Kredit lain direstrukturisasi	-	2.460	50
	d. Lainnya	2.881	-	1.901

Sumber: PT. Bank Dipo Internasional

Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2000-2002 untuk kredit yang kurang lancar mengalami penurunan, kredit diragukan mengalami kenaikan dan untuk kredit macet mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas mengenai pentingnya kelayakan usaha calon debitur dalam kegiatan pemberian kredit untuk mencegah kemungkinan terjadinya kredit macet yang disertai dengan data mengenai besarnya jumlah kredit yang bermasalah yang dialami oleh PT. Bank Dipo telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Manfaat Analisis Kelayakan Usaha Calon Debitur Terhadap Risiko Kredit Macet pada PT. Bank Dipo Internasional”.

1.2. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1.4. Kegunaan Penelitian

Terdapat dua kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

A. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam khususnya mengenai kelayakan usaha calon debitur dan risiko kredit macet yang dialami oleh PT. Bank Dipo Internasional. Penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan yang bernilai bagi pembaca dalam dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan dunia penelitian pada khususnya.

B. Bagi Pembaca

Sebagai bahan bacaan yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat mengembangkan penalaran ilmiah bagi seluruh mahasiswa/i Universitas Pakuan khususnya di Fakultas Ekonomi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran untuk membantu memecahkan masalah dan dapat mengantisipasi permasalahan yang dihadapi oleh PT. Bank Dipo Internasional khususnya yang berkaitan dengan kelayakan usaha calon debitur terhadap risiko kredit macet.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Paradigma Penelitian

1.5.1. Kerangka Pemikiran

Kredit merupakan kegiatan bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) setelah bank menghimpun dana dari masyarakat (*funding*). Kegiatan penyaluran dana ini sering juga disebut dengan istilah “pengalokasian dana”.

Arti lain dari pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari perhimpunan dana dalam bentuk simpanan. Penjualan dana ini tidak lain agar bank dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin. Dalam mengalokasikan dananya pihak bank harus dapat memilih dari beberapa alternatif yang ada. (Kasmir, 2000, 91).

Tujuan dari pengalokasian dana kepada nasabah adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan syarat dan ketentuan yang disepakati dalam perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah.

Dalam pemberian kredit atau pengalokasian dana ke debitur, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian serta selalu waspada dan harus sesuai dengan peraturan perbankan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan karena pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang paling tinggi tingkat risikonya dan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank tersebut. Risiko yang dimaksud disini adalah

kemungkinan terjadinya kredit yang bermasalah yang mengarah pada kredit macet.

Kredit macet atau kredit yang bermasalah dapat dicegah dengan melakukan penelitian tentang kelayakan usaha calon debitur. Kelayakan usaha calon debitur mencakup latar belakang perusahaan, prospek usahanya serta faktor-faktor lainnya.

Penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur biasanya dilakukan oleh satu tim atau bagian dalam organisasi perkreditan terhadap permohonan kredit yang diajukan. Dengan tujuan untuk menilai kondisi calon debitur dengan menggunakan faktor pemberian dan penilaian kredit.

Kegiatan studi kelayakan usaha dilaksanakan oleh sebuah tim yang minimum terdiri dari:

- a. Seorang ekonom yang menguasai aspek manajemen serta teknik riset pasar dan pemasaran.
- b. Seorang analisis keuangan
- c. Seorang teknikus yang menguasai aspek produksi, teknis dan teknologis bidang usaha yang akan di masuki proyek yang akan dibangun. (Sutojo, 2002, 10)

Kelayakan usaha calon debitur merupakan dasar untuk menetapkan struktur kredit yang diberikan serta saran dalam mengambil keputusan yang sehat. Penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur yang kurang akurat dan teliti akan menyebabkan

terjadinya kredit macet yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas kredit bank tersebut.

Manfaat dilakukannya penelitian atas kelayakan usaha calon debitur adalah untuk menyatakan bahwa suatu rencana bisnis layak untuk direalisasikan.

Kelayakan usaha calon debitur terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Penemuan Ide
2. Tahap Penelitian
3. Tahap Evaluasi (Umar, 2003, 21-24)

Selain melakukan tahapan-tahapan dalam kelayakan usaha calon debitur maka pihak bank juga harus mengetahui dan menilai tentang aspek-aspek dalam kelayakan usaha calon debitur serta penilain terhadap laporan keuangan calon debitur.

Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan oleh pihak bank dalam proses pemberian kredit kepada debitur. Karena hal ini dapat membantu bank dalam upayanya untuk meminimalisasikan risiko kredit macet yang mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat kesehatan dan kelangsungan usaha bank tersebut.

Adapun pengertian dari kredit adalah pemberian modal oleh bank kepada debitur yang membutuhkan dana untuk kelangsungan usahanya dengan perjanjian yang dibuat antara pihak bank dengan debitur.

- c. Kredit Perorangan
3. Dilihat dari segi jangka waktu
 - a. Kredit Jangka Pendek
 - b. Kredit Jangka Menengah
 - c. Kredit Jangka Panjang
 4. Dilihat dari segi Jaminan
 - a. Kredit dengan Jaminan
 - b. Kredit tanpa Jaminan
 5. Dilihat dari segi sektor usaha
 - a. Kredit Pertanian
 - b. Kredit Peternakan
 - c. Kredit Industri
 - d. Kredit Pertambangan
 - e. Kredit Pendidikan
 - f. Kredit Profesi
 - g. Kredit Perumahan
 - h. Dan sektor-sektor lainnya. (Kasmir, 2000, 109-112)

Dari berbagai macam jenis kredit yang diberikan oleh bank, maka tanpa disengaja akan timbul pula berbagai jenis risiko kredit yang akan dihadapi oleh bank dalam pemberian kredit.

Risiko tersebut dapat ditekan dengan cara memberi batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah (pagu) kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu

(Credit line limit), serta dengan melakukan diversifikasi. (Arifin, 2003, 227-228)

Risiko kredit macet adalah kemungkinan terjadinya kredit yang bermasalah yang mengarah pada kredit macet. Adapun pengertian dari kredit macet adalah kredit yang telah jatuh tempo dan si debitur tidak dapat membayar angsuran pokok dan atau bunganya dan telah melampaui 270 hari.

Tahapan-tahapan tersebut dapat dilakukan oleh pihak bank untuk mengantisipasi risiko kredit macet. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut maka pihak bank harus memperhatikan kelayakan usaha calon debitur serta aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit serta hal-hal lainnya yang termasuk dalam asas perkreditan yang sehat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit macet. Karena akibat dari kredit macet bukan hanya berakibat bagi bank yang memberikan kredit tetapi juga berakibat bagi debitur yang menunggak. Karena kedua-duanya sama-sama menanggung akibat dari terjadinya kredit macet.

Berikut adalah akibat dari kredit macet:

a. Bagi Debitur

Akibat kredit macet bagi debitur adalah debitur harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung selam kredit tersebut belum dapat dilunasi (utang pokok ditambah dengan bunga), sehingga jumlah kewajiban debitur semakin lama semakin bertambah besar.

b. Bagi Bank

Kredit macet bagi bank juga merupakan persoalan serius. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan yaitu, pertama, karena dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari masyarakat dan yang kedua, kredit macet mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. (Supramono, 1996, 134-135)

Bank yang terganggu kesehatannya akan sulit melayani permintaan debitur, seperti permohonan kredit, penarikan tabungan dan deposito. Keadaan yang demikian mempengaruhi pula kepercayaan masyarakat terhadap bank berkurang, bahkan dapat terjadi lebih dari itu, izin usaha bank dicabut pemerintah dan di likuidasi.

Jika penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur selalu dilakukan dalam pemberian kredit kepada calon debitur, maka diharapkan dapat mengurangi risiko kredit macet dan besar kemungkinan untuk dapat menghindari terjadinya kredit macet. Dengan demikian dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan bank melalui sektor kredit.

1.6. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan dari identifikasi masalah, tujuan dari penelitian dan kerangka pemikiran yang telah diuraikan, maka penulis mengungkapkan hipotesis sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kelayakan usaha calon debitur pada PT. Bank Dipo Internasional periode 2000-2002 sudah cukup baik namun kurang maksimal.
2. Banyaknya hambatan yang di temui oleh PT. Bank Dipo Internasional dalam kegiatan pemberian kredit.
3. Kelayakan usaha calon debitur mempunyai pengaruh yang besar terhadap risiko kredit macet pada PT. Bank Dipo Internasional periode 2000-2002.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Keuangan

Di dalam suatu perusahaan diperlukan suatu sistem yang mengatur kekayaan untuk menjalankan usahanya. Dimana sistem tersebut mengatur proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian serta penggunaan semua sumber daya organisasi untuk tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

2.1.1. Pengertian Manajemen Keuangan

Berikut ini adalah beberapa pendapat dari para ahli mengenai pengertian dari manajemen keuangan, diantaranya:

Manajemen Keuangan adalah semua aktivitas perusahaan yang bersangkutan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. (Sutrisno, 2000, 74)

Pendapat lain menyatakan bahwa pengertian manajemen keuangan, adalah sebagai berikut:

Manajemen keuangan merupakan kegiatan perencanaan, penerapan dan pengendalian dari; pemanfaatan (pengalokasian dana, pencarian dana dan pendistribusian laba). (C. Handoyo, 1997, 5)

Sedangkan menurut Husnan (1998), mengatakan yang dimaksud dengan manajemen keuangan adalah “membicarakan

pengelolaan keuangan, yang pada dasarnya dapat dilakukan oleh individu, perusahaan maupun pemerintah". (Husnan, 1998, 15)

Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan merupakan kegiatan mengelola usaha dalam perolehan dana yang diperlukan dan penggunaan dana yang bertujuan untuk memaksimalkan laba dapat tercapai.

2.1.2. Tujuan Manajemen Keuangan

Untuk membantu manajer keuangan dalam mengambil keputusan keuangan yang sehat dan benar, manajer keuangan perlu menentukan tujuan yang akan dicapai. Dimana tujuan yang akan dicapai adalah untuk dapat memaksimumkan nilai perusahaan.

Para ahli menyatakan pendapatnya mengenai tujuan manajemen keuangan, diantaranya:

Tujuan manajemen keuangan adalah mencapai atau memperoleh laba yang maksimal untuk kemakmuran pemilik perusahaan, menjaga kelangsungan hidup perusahaan (*going concern*) dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. (Martono dan Harjito, 2003, 3)

Pendapat lain mengenai tujuan manajemen keuangan adalah Tujuan manajemen keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dan menggunakan dana guna memaksimalkan nilai organisasi. (Weston and Thomas, 1996, 6)

Sedangkan menurut Brigham dan Gapenski adalah:

The primary goal of management should be to maximize stockholders wealth, and this means maximizing the price of the firm's stock. Further more, action which

maximize stock price also increate social welfare.
(Brigham and Gapenski, 1997, 29)

Berdasarkan definisi diatas mengenai tujuan dari manajemen keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen keuangan adalah sama dengan tujuan perusahaan yaitu untuk memaksimalkan laba bagi kelangsungan kehidupan perusahaan dan bagi para pemegang saham, dan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

2.1.3. Fungsi Manajemen Keuangan

Beberapa pengertian mengenai fungsi manajemen keuangan yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:

Fungsi manajemen keuangan adalah suatu usaha merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien dan efektif. (Hadiprodjo, 1996, 13)

Pendapat lain menyatakan bahwa fungsi manajemen keuangan adalah dua kegiatan utama, yaitu kegiatan menggunakan dana (*Allocation of funds*) dan kegiatan mencari pendanaan (*raising of funds*). (Husnan dan Pudjiastuti, 1998, 3-7)

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai fungsi dari manajemen keuangan dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi manajemen keuangan mempunyai fungsi yang sama dengan manajer keuangan yaitu bertugas dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan.

aktivitas yang akan dikerjakan di masa datang untuk melihat atau mengetahui tingkat kelayakan laba yang akan diperoleh. (Kusnadi, Ichsan dan Syaifi, 2000, 3)

Dari beberapa definisi mengenai pengertian analisis kelayakan usaha dapat disimpulkan bahwa analisis kelayakan usaha adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan benar dan sehat serta menilai apakah suatu usaha dapat dikatakan layak untuk direalisasikan.

2.2.2. Tujuan Analisis Kelayakan Usaha

Beberapa pernyataan mengenai tujuan dilakukan analisis kelayakan usaha, diantaranya adalah:

Tujuan studi kelayakan usaha untuk membantu dalam mengambil keputusan dalam kegiatan pemberian kredit. Apakah laporan studi kelayakan usaha yang telah dibuat dinyatakan layak untuk direalisasikan. (Umar, 1999, 7)

Pendapat lain menyatakan tujuan analisis kelayakan usaha adalah sebagai berikut:

Tujuan analisis kelayakan usaha untuk menilai kelayakan suatu gagasan usaha dan hasil dari penilaian kelayakan ini merupakan suatu pertimbangan apakah usaha tersebut diterima atau ditolak. (Ibrahim, 2003, 3)

Sedangkan pendapat lain mengenai tujuan analisis kelayakan usaha adalah:

Tujuan analisis kelayakan usaha dilakukan untuk memperhitungkan apakah tim penyusun sistem dapat menyelesaikan masalah dalam waktu dan anggaran biaya yang masuk akal. (Sidharta, 1996, 6)

Dari beberapa pendapat mengenai tujuan analisis kelayakan usaha dapat disimpulkan bahwa tujuan analisis kelayakan usaha

adalah untuk membantu mengambil keputusan dalam kegiatan pemberian kredit serta untuk menilai kondisi calon debitur dengan menggunakan faktor pemberian dan penilaian kredit.

2.2.3. Tahapan Kelayakan Usaha

Dalam menilai kelayakan dari suatu usaha terdiri dari beberapa tahapan antara lain:

1. Penemuan Ide
Dalam tahapan penemuan ide lebih terfokus pada produk apa yang akan dibuat haruslah berpotensi untuk laku dijual dan dapat memberikan laba atau keuntungan.
2. Tahapan Penelitian
Tahap penelitian ini dilakukan setelah ide usaha dipilih, selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memakai metode ilmiah.
3. Tahapan Evaluasi
Dalam tahapan ini ada tiga macam evaluasi, pertama, mengevaluasi usulan usaha yang akan didirikan; kedua, mengevaluasi usaha yang sedang dibangun; ketiga, mengevaluasi usaha yang sudah dioperasionalkan secara rutin. (Umar, 2003, 21-24)

2.2.4. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Kelayakan Usaha

Dalam proses menilai suatu kelayakan usaha, ada beberapa aspek yang mempengaruhi kelayakan dari suatu usaha dimana setiap aspek saling berkaitan antara satu aspek dengan aspek yang lainnya. Aspek-aspek tersebut harus diperhatikan dalam malakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur.

Aspek-aspek tersebut adalah:

1. Aspek Teknis
Menyangkut masalah penyediaan sumber-sumber dan pemasaran hasil-hasil produksi. Seperti lokasi tempat

usaha, prasarana yang ada dapat memudahkan atau merintang pelaksanaan usaha.

2. Aspek Institusional

Menyangkut masalah-masalah organisasi pemerintah dan masyarakat. Seperti seberapa jauh peranan pemerintah dan peraturan yang ada dapat memberikan kemudahan atau halangan dalam pelaksanaan proyek. Serta reaksi masyarakat setempat dapat membantu atau menghalangi pelaksanaan proyek.

3. Aspek Sosial

Dalam pendirian proyek dapat mempunyai tujuan-tujuan sosial yang bersifat khusus. Tujuan-tujuan sosial khusus suatu proyek dapat tercermin seperti dalam hal penyediaan kesempatan kerja dan akibat pemerataan pendapatan.

4. Aspek Eksternalitas

Eksternalitas ini dapat bersifat positif yaitu memberikan tambahan benefit dan dapat juga bersifat negatif yaitu mengakibatkan kerugian masyarakat. (Simanjuntak, 1997, 4-6)

Pendapat lain mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penilaian kelayakan usaha adalah:

1. Aspek Yuridis atau Hukum

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui siapa saja pemilik perusahaan dan besarnya modal dari masing-masing pemilik.

2. Aspek Pemasaran

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan prospeknya dimasa datang.

3. Aspek Keuangan

Dalam aspek ini yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut.

4. Aspek Teknis dan Operasional

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, serta jenis mesin yang digunakan.

5. Aspek Manajemen

Aspek ini untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya.

Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan berbagai pertimbangan lainnya.

6. Aspek Sosial Ekonomi

Dalam aspek ini menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti:

- a. Meningkatkan ekspor barang
- b. Mengurangi pengangguran
- c. Meningkatkan pendapatan masyarakat
- d. Tersedianya sarana dan prasarana
- e. Membuka isolasi daerah tertentu

7. Aspek Amdal

Aspek ini menyangkut analisis terhadap lingkungan baik darat, air atau udara. Jika usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apabila kredit tersebut disalurkan maka usaha yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan sekitarnya. (Kasmir, 2000, 107-110)

Dari beberapa pendapat mengenai aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penilaian kelayakan usaha dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek tersebut sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam kegiatan pemberian kredit.

2.2.5. Penilaian Terhadap Kinerja Keuangan

Dalam menentukan kelayakan usaha, selain menilai dan mengetahui aspek-aspek yang mempengaruhi kelayakan dari suatu usaha juga harus memperhatikan dan menilai kinerja keuangan dari usaha atau calon debitur tersebut.

Penilaian kinerja keuangan sangat penting karena untuk mengetahui keadaan keuangan calon debitur. Dalam penilaian laporan keuangan diusahakan agar diperoleh laporan keuangan yang sudah diaudit, agar auditor dapat memberikan pandangan yang bebas

tentang keuangan calon debitur sebagai hasil dari pemeriksaan terhadap pembukuan calon debitur.

Penilaian kinerja keuangan mempunyai tujuan yaitu:

Untuk memberikan informasi yang akurat, juga memperlihatkan secara jelas perubahan posisi keuangan dari waktu ke waktu untuk kepentingan analisis potensi keuangan perusahaan dan perkembangannya. (Santoso, 1997, 186)

2.2.6. Metode Penilaian Kinerja Keuangan

Definisi analisis laporan keuangan secara umum adalah penelitian atau penilaian yang dilakukan untuk dapat mengetahui keadaan keuangan nasabah. Apakah laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan terjamin kebenarannya. Menurut Syafri Harahap yang dimaksud dengan analisis laporan keuangan adalah menggali lebih banyak informasi yang dikandung suatu laporan keuangan. (Syafri Harahap, 1999, 1)

Dalam penilaian kinerja keuangan dapat dilakukan dengan analisis komparatif. Dimana dalam bentuknya analisis ini dapat dibedakan pada dua hal yaitu:

a. Analisis Horizontal (Analisis Trend)

Yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan kegiatan suatu usaha baik secara absolute maupun dalam bentuk relative atas bagian kegiatan yang ada dengan kegiatan yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Dari analisis ini akan diperoleh suatu kesimpulan apakah telah terjadi kemajuan atau kemunduran usaha dari masing-masing. Adapun cara yang ditempuh dalam membandingkan laporan keuangan suatu

periode dengan periode yang lainnya tersebut dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan antara lain:

1. Indeks dasar tunggal (*Single base index*) yang dipilih dari tahun laporan termuda.
 2. Indeks dasar berganti (*Moving base index*) dalam pendekatan cara ini indeks dasar yang akan dipakai adalah semua periode laporan yang akan dianalisis.
- b. Analisis Vertikal (Analisis Common size)
- Sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen dengan objektif maka manajemen harus dapat mengetahui dan memanfaatkan pos-pos mana yang dominan untuk mencapai tujuan dengan memberikan perhatian yang khusus. (Pudjo Muljono, 1996, 40-43)

Pendapat lain mengenai penilaian kinerja keuangan,

dinyatakan dalam beberapa tahapan yaitu:

1. Analisis Per Pos
Dalam analisis ini adalah menganalisa masing-masing pos yang ada dalam neraca maupun laporan laba rugi.
2. Analisis Prosentase Per Komponen
Dalam teknik ini laporan keuangan disajikan dalam prosentase-prosentase yaitu prosentase dari masing-masing pos neraca terhadap total aktiva sedangkan untuk pos-pos laporan laba rugi prosentase dihitung bea terhadap jumlah penjualan bersih. Dengan cara ini akan diketahui:
 1. Tingkat investasi dari masing-masing pos (*over investment or under investment*).
 2. Struktur permodalan.
 3. Jumlah atau prosentase dari setiap rupiah penjualan yang terserap dalam tiap-tiap jenis biaya.
3. Analisis Perbandingan
Dalam analisis ini diadakan perbandingan pos-pos dalam neraca dan laporan laba rugi dari suatu periode dengan periode lainnya. Dengan analisis ini dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi, dan perubahan mana yang memerlukan penelitian lebih lanjut.
4. Analisis Ratio
Ratio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu pos atau kelompok pos dengan pos atau kelompok pos yang lain, baik yang tercantum dalam neraca maupun dalam laporan laba rugi. (Munawir, 2002, 238)

Dari beberapa pengertian mengenai tahapan dalam penilaian kinerja keuangan dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan dari tahun-tahun sebelumnya.

2.3. Risiko Kredit Macet

Dalam setiap usaha pasti terdapat risiko yang harus dihadapi dalam kegiatan usaha tersebut. Sama halnya dengan perusahaan perbankan dalam kegiatan pemberian kredit. Beragamnya jenis usaha yang ada dimasyarakat menyebabkan beragam pula kebutuhan masyarakat akan dana. Dari kebutuhan dana yang beragam ini menyebabkan jenis kredit yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan dana yang diinginkan oleh para calon debitur.

Dari berbagai macam jenis kredit yang diberikan oleh bank, maka tanpa disengaja akan timbul pula berbagai jenis risiko kredit yang akan dihadapi oleh bank dalam pemberian kredit.

2.3.1. Pengertian Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Selain itu pengertian lain mengenai kredit adalah sebagai berikut:

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati. (PudjoMuljono, 1996, 10)

Pendapat lain mengatakan bahwa kredit adalah:

Credit is to give or extend economic value to someone or to business firm now on faith or trust that the economic equivalent will be returned to be extender in the future. (Encyclopedia of professional management vol I, 1996, 250)

Dalam pemberian kredit, terdapat hal-hal yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu dimasa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, setelah bank melakukan penelitian terhadap calon debitur baik secara intern maupun ekstern.
2. Kesepakatan
Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pihak bank dengan pihak debitur atau si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.
3. Jangka waktu
Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut dapat berbentuk jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang.
4. Risiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit, semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya.

5. **Balas jasa**
Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang kita kenal dengan nama bunga. (Kasmir, 2000, 94-95)

2.3.2. Jenis-jenis Kredit

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit yang diberikan oleh bank menjadi beragam. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dana yang diinginkan oleh debitur.

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari beberapa segi antara lain:

1. Dilihat dari segi kegunaan.
 - a. **Kredit Investasi**
Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - b. **Kredit Modal Kerja**
Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari segi tujuan kredit.
 - a. **Kredit Produktif**
Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - b. **Kredit Konsumtif**
Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - c. **Kredit Perdagangan**
Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang

dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Dilihat dari segi jangka waktu.
 - a. Kredit Jangka Pendek
Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - b. Kredit Jangka Menengah
Merupakan kredit yang jangka waktunya kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.
 - c. Kredit Jangka Panjang
Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya diatas tiga tahun sampai lima tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.
4. Dilihat dari segi jaminan.
 - a. Kredit dengan Jaminan
Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur.
 - b. Kredit tanpa Jaminan
Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama berhubungan dengan bank atau pihak lain.
5. Dilihat dari sektor usaha.
 - a. Kredit Pertanian
Merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
 - b. Kredit Peternakan
Merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
 - c. Kredit Industri
Merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
 - d. Kredit Pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak atau timah.

e. Kredit Pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

f. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional.

g. Kredit Perumahan

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.

h. Dan sektor-sektor lainnya. (Kasmir, 2000, 99-102)

Pendapat lain mengenai jenis-jenis kredit, dinyatakan bahwa jenis-jenis kredit diklasifikasikan menjadi:

1. Atas dasar tujuan penggunaan

Atas dasar tujuan penggunaan oleh debitur, kredit dapat dibedakan menjadi:

a. Kredit Modal Kerja (KMK)

Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja debitur ditinjau dari jangka waktunya, kredit modal kerja terdiri dari dua macam yaitu:

1. Kredit modal kerja – *Revolving*

Kredit modal kerja *Revolving* ini diberikan apabila kegiatan usaha debitur dapat diharapkan berlangsung secara kontinyu dalam jangka panjang dan pihak bank cukup mempercayai kemampuan dan kemauan debitur, maka fasilitas KMK debitur dapat diperpanjang setiap periodenya tanpa harus mengajukan permohonan kredit baru.

2. Kredit modal kerja – *Einmaleg*

Kredit modal kerja *Einmaleg* ini diberikan apabila volume kegiatan usaha debitur sangat fluktuasi dari waktu ke waktu atau pihak bank kurang mempercayai kemampuan dan kemauan nasabah, maka pihak bank merasa lebih aman kalau memberikan KMK *Einmaleg*.

Fasilitas ini diberikan sebatas satu kali perputaran usaha debitur, dan apabila pada periode selanjutnya nasabah menghendaki

KMK kembali maka debitur harus mengajukan permohonan kredit baru.

b. Kredit Investasi

Kredit investasi adalah kredit yang digunakan untuk pengadaan barang modal jangka panjang untuk kegiatan usaha debitur.

c. Kredit Konsumsi

Kredit Konsumsi adalah kredit yang digunakan dalam rangka pengadaan barang atau jasa untuk tujuan konsumsi, dan bukan sebagai barang modal dalam kegiatan usaha debitur.

2. Atas dasar penarikan dana

Atas dasar cara penarikan dana yang akan diberikan oleh bank, kredit dapat dibedakan menjadi:

a. *Cash Loan*

Adalah kredit yang memungkinkan debitur menarik dana tunai secara langsung tanpa adanya persyaratan khusus tertentu yang termasuk dalam kredit jenis ini adalah kredit investasi dan kredit modal kerja.

b. *Non – Cash Loan*

Adalah kredit yang tidak memungkinkan nasabah menarik dana tunai secara langsung tanpa ada persyaratan khusus tertentu. Yang termasuk dalam jenis kredit ini adalah bank garansi dan *letter of credit*. (Triandaru dan Susilo, 2000, 73-74)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa beragamnya jenis usaha yang ada dimasyarakat menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Dari beragamnya kebutuhan akan dana ini menyebabkan jenis kredit yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan dana yang diinginkan oleh para debitur.

2.3.3. Pengertian Kredit Macet

Pengertian dari kredit macet adalah kredit yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Tidak dapat memenuhi kriteria kredit lancar, kredit kurang lancar dan kredit diragukan.
2. Dapat memenuhi kriteria kredit diragukan, tetapi setelah jangka waktu 21 bulan semenjak masa

- penggolongan kredit diragukan belum terjadi pelunasan pinjaman atau upaya penyelamatan kredit.
3. Penyelesaian pembayaran kembali kredit yang bersangkutan telah diserahkan kepada pengadilan negeri atau telah diajukan permintaan ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit. (Sutojo, 2000, 184)

Selain itu pengertian lain mengenai kredit macet, adalah Kredit macet merupakan piutang bank atau kredit yang diberikan yang tidak bisa dikembalikan atau dilunasi oleh nasabah. (Soemarso, 1997, 70)

Pendapat lain menyatakan bahwa kredit macet, adalah Kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang nasabah tidak mampu lagi membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. (Supramono, 1996, 131)

Dari beberapa pengertian tentang kredit macet maka dapat diambil kesimpulan bahwa kredit macet merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak dapat melunasi dan mengembalikan kredit yang telah diberikan oleh bank.

2.3.4. Faktor Penyebab Kredit Macet

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet atau kredit yang bermasalah adalah:

1. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan.
Pejabat bank sering tidak mengikuti dan kurang disiplin dalam menerapkan prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit dalam suatu bank. Hal yang sering terjadi, bank tidak mewajibkan calon debitur membuat studi kelayakan dan menyampaikan data keuangan

yang lengkap. Penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan tersebut bisa disebabkan karena jumlah dan kualitas sumber daya manusia, khususnya yang menangani masalah perkreditan belum memadai. Disamping itu, salah satu penyebab timbulnya kredit bermasalah tersebut dari sisi intern bank adalah adanya pihak dalam bank yang sangat dominan dalam pemutusan kredit.

2. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit.

Untuk mengukur kelemahan sistem administrasi dan pengawasan kredit bank dapat dilihat dari dokumen kredit yang seharusnya diminta dari debitur tetapi tidak dilakukan oleh bank, berkas perkreditan tidak lengkap dan tidak teratur, pemantauan terhadap usaha debitur tidak dilakukan secara rutin, termasuk peninjauan langsung pada lokasi usaha debitur secara periodik. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan tersebut menyebabkan kredit yang secara potensial akan mengalami masalah, tidak dapat dilacak secara dini, sehingga bank terlambat melakukan langkah-langkah pencegahan.

3. Lemahnya sistem informasi kredit.

Sistem informasi kredit yang tidak berjalan sebagaimana mestinya akan memperlemah keakuratan pelaporan bank yang pada gilirannya akan sulit melakukan deteksi dini. Hal tersebut dapat menyebabkan terlambatnya pengambilan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah.

4. Kegagalan usaha debitur.

Kegagalan usaha debitur merupakan faktor utama penyebab kredit macet. Karena apabila debitur mengalami kegagalan dalam usahanya akan mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya, yang akhirnya akan mengakibatkan kredit macet atau kredit yang bermasalah. Kegagalan usaha debitur ini dapat terjadi karena debitur mengalami musibah atau karena usaha debitur sudah tidak dapat lagi bersaing dipasaran, sehingga usaha debitur tidak dapat menghasilkan laba atau keuntungan. (Siamat, 2001, 175-177)

2.3.5. Pengertian Risiko Kredit

Beberapa pendapat mengenai pengertian risiko kredit macet, diantaranya adalah:

Risiko kredit atau sering juga disebut dengan (*default risk*) merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan. (Siamat, 2001, 92)

Sedangkan pendapat lain mengenai pengertian risiko kredit adalah sebagai berikut:

Credit risk arises because of the possibility that promised cash flows on financial claims held by financial intermediaries, such as loans or bonds, will not be paid in full. (Anthony and Marcia, 2003, 248)

Pendapat lain menyatakan mengenai pengertian risiko kredit adalah "*Credit risk is the risk that the issuer of a security may fail to make promised payment to the investor at the times specified*". (Andrew and Gallagher, 1997, 41)

Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa risiko kredit adalah risiko atas ketidakmampuan debitur untuk dapat melunasi pinjaman dengan jangka waktu yang telah disepakati antara pihak bank dengan pihak debitur.

2.3.6. Jenis-jenis Risiko Kredit

Dari berbagai macam jenis kredit yang diberikan oleh bank, maka tanpa disengaja akan timbul pula berbagai jenis risiko kredit

yang akan dihadapi oleh bank dalam kegiatan pemberian kredit.

Jenis-jenis risiko kredit yang harus dipahami antara lain:

1. **Risiko dari Sifat Usaha**
Sifat risiko yang dihadapi oleh suatu kegiatan berbeda dengan kegiatan yang lain. Dari sifat-sifat usaha tersebut dapat diketahui tinggi rendahnya tingkat risiko usaha.
2. **Risiko Geografis**
Faktor geografis juga mempunyai pengaruh terhadap risiko kegiatan usaha.
3. **Risiko Politik**
Banyak usaha perkreditan yang gagal disebabkan karena tidak adanya kebijakan politik yang jelas, misalnya risiko usaha disuatu negara yang sedang dilanda perang saudara sudah pasti berisiko tinggi.
4. **Risiko Uncertainty**
Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi. Dan setiap usaha yang bersifat spekulasi mempunyai risiko tinggi, karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan sebelumnya dengan baik.
5. **Risiko Inflasi**
Bentuk risiko yang lain yang sifatnya abstrak adalah risiko karena adanya inflasi, walaupun hutang pokok telah dibayar lunas oleh debitur, tetapi pada masa inflasi tinggi ini bank mengalami penurunan daya beli dari rupiah yang dipinjamkan kepada debiturnya.
6. **Risiko Persaingan**
Untuk memasuki pasar, setiap jenis usaha harus siap bersaing dengan lawan, atau persaingan antara perusahaan sejenis yang menjadi objek perkreditan. (Astiko dan Sunardi, 1996, 44-46)

2.3.7. Upaya Penyelesaian Kredit Macet

Penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit.

2. *Reconditioning*

Dalam hal ini bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

a. Kapitalisasi bunga.

Yaitu bunga dijadikan hutang pokok

b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.

Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya adalah hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c. Penurunan suku bunga.

Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban debitur.

d. Pembebasan bunga.

Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada debitur dengan pertimbangan debitur tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada debitur dengan cara menambah modal debitur dengan pertimbangan debitur memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi dengan menambah jumlah kredit dan dengan menambah *equity*.

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi atau gabungan dari *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila debitur benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya. (Kasmir,2002, 129-131)

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak

akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar.

2.3.8. Akibat Kredit Macet

Dalam kegiatan pemberian kredit, bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit dan aspek-aspek dalam penilaian kelayakan usaha calon debitur serta hal-hal lainnya yang termasuk dalam asas perkreditan yang sehat. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kredit macet yang berakibat buruk bagi kedua belah pihak.

Berikut ini adalah akibat dari kredit macet:

1. Bagi Debitur

Akibat kredit macet bagi debitur adalah debitur harus menanggung beban kewajiban yang cukup berat terhadap bank, karena bunga tetap dihitung selama kredit belum dapat dilunasi (utang pokok ditambah dengan bunga), sehingga jumlah kewajiban debitur semakin lama semakin bertambah besar.

2. Bagi Bank

Kredit macet bagi bank merupakan persoalan serius. Ada dua alasan yang dapat dikemukakan yaitu, pertama, karena dana bank yang disalurkan dalam bentuk kredit itu berasal dari masyarakat dan yang kedua, kredit macet mengakibatkan bank kekurangan dana sehingga mempengaruhi kegiatan usaha bank. (Supramono, 1996, 134-135)

2.4. Manfaat Analisis Kelayakan Usaha Calon Debitur Terhadap Risiko Kredit Macet

Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Kegiatan bank selain menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit.

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Seperti terjadinya kredit yang bermasalah atau terjadinya kredit macet. Kredit macet atau kredit yang bermasalah menjadi masalah yang sangat serius bagi bank.

Dalam menghindari risiko terjadinya kredit yang bermasalah atau kredit yang mengarah kepada kredit macet, bank harus ekstra hati-hati dalam pengambilan keputusan terhadap kredit yang diajukan oleh calon debitur. Serta bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit serta aspek-aspek dalam penilaian kredit dan hal lainnya yang termasuk kedalam asas perkreditan yang sehat.

Untuk menghindari dan meminimalisasikan risiko kredit macet tersebut, bank perlu melakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur. Kelayakan usaha calon debitur ini mencakup latar belakang perusahaan, prospek usahanya, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan kelayakan usaha calon debitur ini dilakukan agar bank merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dan dapat diterima kembali.

Tujuan lain dilakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur adalah untuk menilai kelayakan suatu gagasan usaha dan hasil dari penelitian kelayakan ini merupakan suatu pertimbangan apakah usaha tersebut dapat diterima atau ditolak.

Dalam analisis ini bank melakukan penilaian dalam berbagai hal. Dimulai dari penilaian terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi kelayakan suatu usaha sampai dengan penilaian terhadap kinerja keuangan calon debitur.

Karena akibat dari kredit yang bermasalah atau kredit macet bukan hanya berakibat bagi bank yang memberikan kredit tetapi juga berakibat bagi nasabah yang menunggak. Kredit macet dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Bank yang terganggu kesehatannya akan sulit melayani permintaan debitur.

Jika analisis kelayakan usaha calon debitur selalu dilakukan dalam kegiatan pemberian kredit, maka diharapkan dapat mengurangi risiko terjadinya kredit macet dan besar kemungkinan untuk dapat menghindari terjadinya kredit macet. Dengan demikian dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan bank melalui sektor kredit.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Dalam penyusunan makalah ini, penulis memilih objek penelitian Manfaat Analisis Kelayakan Usaha Calon Debitur Terhadap Risiko Kredit Macet pada PT. Bank Dipo Internasional yang berlokasi di jalan Letnan Jenderal S. Parman kav-75 Jakarta.

Bank Dipo Internasional adalah bank swasta yang menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dan memberikan kredit, baik kredit jangka pendek, menengah dan jangka panjang pada perusahaan dan perseorangan untuk perkembangan usahanya.

Masalah yang dihadapi oleh Bank Dipo adalah sulitnya menekan jumlah kredit macet yang terjadi. Penulis telah mengadakan penelitian pada PT. Bank Dipo Internasional.

3.2. Metode Penelitian

3.2.1. Desain Penelitian

Dalam penyusunan makalah ini diperlukan suatu desain penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan serta menganalisis data yang terkait.

Adapun elemen-elemen dari desain penelitian adalah:

1. Jenis, Metode dan Teknik Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif Eksploratif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, penyebab terjadinya masalah tersebut serta cara penyelesaian masalah dengan menjabarkan kondisi yang terjadi.

b) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus yaitu dengan mempelajari masalah yang terjadi pada objek penelitian.

c) Teknik Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik komparatif, yaitu suatu penelitian yang tidak menggunakan data statistik.

2. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah bagian kredit pada PT. Bank Dipo Internasional.

3.2.2. Operasionalisasi Variabel

Tabel 4
Manfaat Analisis Kelayakan Usaha Calon Debitur Terhadap Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Dipo Internasional.

Variabel	Indikator	Skala/Ukuran
Kelayakan usaha calon debitur Sub Variabel:		
1. Aspek yang mempengaruhi kelayakan usaha	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Aspek Pasar ◆ Aspek Internal Perusahaan ◆ Aspek Persaingan 	Ordinal Ordinal Ordinal
2. Penilaian Kinerja Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Analisis Vertikal ◆ Analisis Horizontal 	Rasio Rasio
Risiko Kredit Macet Sub Variabel: Faktor Penyebab	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan ◆ Lemahnya sistem pengawasan dan informasi kredit ◆ Penyimpangan dalam pemakaian fasilitas kredit oleh debitur. ◆ Kegagalan usaha debitur 	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

3.2.3. Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini tidak menggunakan penarikan sampel karena metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah non statistik.

Adapun data penelitian yang diambil penulis untuk mengetahui manfaat analisis kelayakan usaha calon debitur terhadap risiko kredit macet. Periode yang diteliti dibatasi yaitu tahun 2000-2002.

3.2.4. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan makalah, penulis telah melakukan beberapa tahapan dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Riset Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari beberapa literature, buku-buku kuliah, berbagai karya ilmiah dan buku-buku yang sesuai dengan masalah dalam penelitian ini.

2. Riset Lapangan (*Field Research*)

Yaitu penelitian secara langsung untuk mendapatkan data-data dengan cara memperoleh langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian, antara lain dengan cara:

a) Wawancara

Melalui teknik ini penulis mencoba mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-

pihak yang kompeten mengenai data yang diperlukan.

b) Observasi

Untuk memperoleh data-data pendukung yang tidak penulis dapatkan dari wawancara mengenai kelayakan usaha calon debitur sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengamatan langsung.

3.2.5. Metode Analisis

Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis Deskriptif Eksploratif, yaitu dengan menjabarkan atau mendeskripsikan kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan.

Kondisi-kondisi tersebut adalah keadaan tentang pelaksanaan kelayakan usaha calon debitur dalam pemberian kredit yang diterapkan oleh Bank dalam upaya untuk mencegah dan meminimalisasikan terjadinya kredit macet.

Untuk menilai kondisi dan hubungan yang ditimbulkan oleh kelayakan usaha calon debitur sebagai variabel independen dan sebagai variabel dependen adalah risiko kredit macet. Penulis menggunakan metode Deskriptif Eksploratif dengan menganalisis data selama 3 tahun (2000-2002) dan kemudian akan dibandingkan dengan teori-teori yang terdapat dalam kepustakaan sehingga di dapat hipotesis penelitian bahwa kelayakan usaha calon debitur memiliki peranan yang besar dalam meminimalisasikan terjadinya kredit macet.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. Sejarah dan perkembangan perusahaan

PT. Bank Dipo Internasional didirikan berdasarkan akta notaris Susana Zakaria, SH, No. 95 tanggal 27 September 1990. Akta pendirian bank telah diumumkan dalam Berita Negara No. 13 Tambahan No. 439 tanggal 13 Februari 1991.

Anggaran dasar bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris H.M. Afdal Gazali, SH, No. 302 tanggal 16 Oktober 1997, mengenai perubahan nama bank, maksud dan tujuan bank dan jangka waktu bank berdiri. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Surat Keputusan No. C2-13320.HT.01.04.Th.97 tanggal 17 Desember 1997 dan diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Oktober 1998 No. 80. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5675.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar bank, ruang lingkup kegiatan bank adalah menjalankan kegiatan umum Perbankan. Bank mulai beroperasi secara komersial sejak bulan September 1991.

Dimana susunan pengurus bank pada tanggal 31 Desember 2004 dan 2003 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Ir. Achmad Soegandhi Noezar

Komisaris : Boediarto Soetrisno Judo

Dewan Direksi

Direktur Utama : Fritz Gunawan

Direktur : Nyoman Wenten Artha

Direktur : Yoen Amal Asnawi

Kantor pusat PT. Bank Dipo Internasional terletak dikawasan Slipi, Jakarta dengan cabang-cabang pembantu di Jakarta (Bandengan, Pecenongan, Kelapa Gading, Mangga Dua dan Fatmawati) dan satu kantor cabang utama di Medan. PT. Bank Dipo Internasional memiliki karyawan per 31 Desember 2004 dan 2003 sebanyak 151 dan 147 karyawan.

4.1.2. Struktur organisasi, Tugas dan Wewenang

PT. Bank Dipo Internasional mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:

1. Dewan Komisaris

A. Komisaris Utama

Wewenang, Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Menyetujui dan mengesahkan rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang yang disusun oleh Direksi Perusahaan.

- ◆ Sebagai anggota Komite Kredit, turut memberikan keputusan dalam proses pemberian kredit.
- ◆ Melakukan pemeriksaan secara berkala atas kebenaran laporan-laporan manajemen.
- ◆ Bersama-sama dengan Anggota Komisaris dan Direksi menyetujui dan mengesahkan peraturan-peraturan serta kebijakan dan prosedur perusahaan/Bank.
- ◆ Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha bank secara signifikan.
- ◆ Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko tersebut diatas, yang dilakukan sekurang-kurangnya dalam triwulanan.
- ◆ Memastikan bahwa manajemen telah menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- ◆ Memastikan bahwa manajemen menjamin, baik auditor intern maupun auditor ekstern dapat bekerja sesuai dengan standar auditing yang berlaku.
- ◆ Menilai efektivitas pelaksanaan fungsi SKAI.
- ◆ Melakukan tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Dewan Komisaris

B. Komisaris

Wewenang, Tanggung Jawab, dan Tugas Pokok:

- ◆ Memutuskan dan mengesahkan besarnya jumlah deviden yang akan dibagikan kepada para pemegang saham setelah berakhirnya tahun buku perusahaan sebagaimana keputusan dalam RUPS.
- ◆ Menyetujui dan mengesahkan rancangan pembagian bonus kepada Direksi dan seluruh karyawan sebagaimana keputusan dalam RUPS.
- ◆ Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Bank berdasarkan laporan yang wajib disampaikan Bank kepada Bank Indonesia.

1. Presiden Direktur

Wewenang, Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Menetapkan dan menyusun garis-garis kebijakan perusahaan di segala bidang, termasuk penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko serta kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah.
- ◆ Menetapkan kriteria *High risk countries, High risk business, dan High risk customer*.
- ◆ Menetapkan kewenangan untuk memberikan keputusan akhir atas transaksi mencurigakan.
- ◆ Bertanggung jawab mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi.

- ◆ Melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab yang dibebankan oleh pemegang saham dari suatu periode ke periode lainnya, termasuk didalamnya penetapan strategi Bank.

3. Direktur Operasi

Wewenang, Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan.
- ◆ Bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen.
- ◆ Bertanggung jawab atas pelaksanaan kaji ulang secara berkala untuk memastikan keakuratan metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen dan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
- ◆ Merancang, menetapkan serta mengevaluasi sistem pelaporan keuangan serta memonitor pemenuhan pelaporan dimaksud untuk pihak intern dan ekstern.
- ◆ Sebagai anggota komite kredit, turut memberikan keputusan dalam proses pemberian kredit.

4. Kepala Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan intern kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris dan Auditee untuk diketahui dan ditindaklanjuti dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- ◆ Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada Bank Indonesia setiap semester untuk direview dan ditanda tangani Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- ◆ Menyusun rencana kerja pengawasan dan pemeriksaan tahunan SKAI yang merupakan pemeriksaan rutin (Routine audit).
- ◆ Melakukan pemeriksaan khusus dengan memperhatikan tingkat penyimpangan, prioritas permasalahan maupun yang diberikan oleh Direktur Utama dan atau Dewan Komisaris.
- ◆ Menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan, serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari Bank akan dapat dicapai secara optimal.

1. Departemen Kas dan Jasa

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Memonitor dengan ketat kegiatan operasi sehari-hari serta menjamin flow of work dan flow of document guna meningkatkan produktivitas personil bidang operasional support.

- ◆ Melindungi aktiva dan passiva Bank dengan melaksanakan fungsi control maupun phisycal control atas penggunaan formulir dan peralatan-peralatan operasional lainnya.
- ◆ Bertanggung jawab atas semua kebenaran laporan dan ketepatan waktu laporan dari semua jenis laporan yang dibuat oleh bagian operation support.
- ◆ Menjaga agar mutu pelayanan Bank kepada nasabah terjaga pada tingkat standard yang tinggi.
- ◆ Melaksanakan tugas-tugas lain sepanjang berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Departemen Kas dan Jasa.

6. Departemen Pinjaman

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Bertanggung jawab atas pemrosesan administrasi atau transaksi yang dilaksanakan di Departemen Pinjaman sesuai dan sejalan dengan prosedur Operai dan Administrasi, Peraturan Pemerintah, Bank Indonesia dan ketentuan-ketentuan lainnya secara efektif dan tepat waktu.
- ◆ Meneliti dan mempelajari Nota Persetujuan untuk pembukuan pinjaman baru sebelum atau pada saat akan dilakukan penarikan atau pencairan.
- ◆ Memonitor, memeriksa laporan-laporan bulanan atau mingguan eksternal dan internal yang berhubungan dengan departemen agar tepat waktu dan akurat.

- ◆ Memonitor atas tunggakan bunga, angsuran dan biaya-biaya lainnya untuk diinformasikan kepada unit marketing guna proses penyelesaiannya.
- ◆ Bertanggung jawab atas kebenaran pembukuan, perhitungan dan pembebanan bunga, baik yang menyangkut transaksi-transaksi pinjaman dan transaksi pasar uang antar bank.

7. Departemen Akunting

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Memastikan bahwa penggunaan metode akuntansi sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
- ◆ Memeriksa rekonsiliasi rekening Bank Indonesia dan Bank lain setiap hari.
- ◆ Mengidentifikasi dan menganalisa setiap ketidak wajaran transaksi yang terjadi.
- ◆ Memelihara dokumen dan arsip (file) yang berkaitan dengan rincian rekening (accounts), subledger, buku besar (general ledger).
- ◆ Menyiapkan data-data yang diperlukan oleh petugas eksternal audit, auditor Bank Indonesia atau pemeriksa pajak.

8. Departemen Umum dan Personalia

A. Departemen Umum

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Bertanggung jawab atas pemrosesan pengadaan investaris dan keperluan kantor yang dilaksanakan di Departemen Umum sesuai dengan prosedur operasi dan administrasi dan ketentuan-ketentuan lainnya.
- ◆ Meneliti dan memeriksa tiket-tiket Departemen Umum, sebagai media pembukuan.
- ◆ Bertanggung jawab atas tersedianya barang cetakan dan alat tulis kantor.

B. Departemen Personalia

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Memenuhi kebutuhan karyawan sesuai dengan permintaan unit kerja di kantor pusat dan kantor cabang pembantu dengan cara menyortir lamaran, menghubungi pelamar, menentukan jadwal test dan interview.
- ◆ Melakukan seleksi karyawan baru dengan cara test psikotes dan interview bekerjasama dengan unit kerja terkait.
- ◆ Membuat laporan bulanan: laporan outstanding pinjaman, absensi, jumlah tenaga kerja, data karyawan kontrak atau percobaan, biaya pengobatan, laporan Jamsostek, rekonsiliasi saldo Jamsostek, laporan daftar upah karyawan.

9. Departemen Marketing

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Melaksanakan persetujuan pemberian kredit sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- ◆ Melakukan supervisi dan pembinaan dalam rangka pengembangan Cabang, khususnya dalam bidang marketing (kredit dan pendanaan).
- ◆ Bertanggung jawab terhadap target atas pencapaian Goal di bidang marketing.
- ◆ Mereview usulan penetapan kualitas kredit debitur kemudian merekomendasikannya untuk mendapat persetujuan komite kredit.
- ◆ Memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada Departemen Marketing telah berjalan dengan baik.

10. Kepala Cabang Pembantu

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Memastikan bahwa sistem pengendalian intern pada kantor Cabang pembantu telah berjalan dengan baik.
- ◆ Bertanggung jawab atas pengeluaran biaya-biaya operasional Kantor Cabang Pembantu sesuai dengan batas wewenang yang dimilikinya.
- ◆ Melakukan cash opname minimal sekali dalam seminggu.

11. Direktur Kepatuhan

Wewenang, Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian.
- ◆ Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
- ◆ Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan.

12. Unit Kerja Pelayanan Nasabah (UKPN)

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Memastikan adanya pengembangan sistem identifikasi nasabah dan transaksi yang mencurigakan.
- ◆ Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait.
- ◆ Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait.
- ◆ Menyusun laporan transaksi yang mencurigakan untuk disampaikan kepada Bank Indonesia.

- ◆ Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan training Prinsip Mengenal Nasabah bagi para pejabat dan Staff Bank.

13. Departemen Kredit

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Sebagai penanggung jawab atas kelengkapan seluruh administrasi dan dokumentasi sesuai yang dipersyaratkan oleh prosedur pemberian kredit sebelum pelaksanaan pengikatan dan pencairan kredit dilaksanakan.
- ◆ Melakukan pengecekan kembali atas pemenuhan persyaratan atau rekomendasi serta usulan-usulan anggota Credit Committee atas proposal kredit yang memperoleh beberapa tanggapan dan perbaikan dalam rapat Credit Committee.
- ◆ Memberikan tanda persetujuan untuk proses pencairan kredit apabila seluruh dokumen kredit atas nasabah bersangkutan telah selesai dan dengan persyaratan kredit.
- ◆ Menanda tangani surat keluar sepanjang menyangkut dengan lingkup tugas administrasi kredit.
- ◆ Memeriksa dan membubuhi paraf atas semua laporan-laporan yang menyangkut bidang perkreditan ke Bank Indonesia sebelum ditanda-tangani oleh Direksi.

14. Departemen Treasury and Funding

Tanggung Jawab dan Tugas Pokok:

- ◆ Senantiasa mengikuti perkembangan tingkat suku bunga di pasar uang dalam negeri dan kejadian-kejadian ataupun berita terkini.
- ◆ Senantiasa memupuk hubungan baik dengan bank-bank koresponden melalui dealer-dealernya dan pihak-pihak berkaitan dengan tugas tetapi tetap mengutamakan kepentingan bank sendiri.
- ◆ Secara berkala memberikan laporan posisi penempatan maupun pinjaman dana dari kegiatan yang telah menjadi tanggung jawabnya.
- ◆ Mengawasi dan memantau serta memperhatikan posisi penempatan dana-dana jangka pendek dan sumber-sumber dana jangka pendek dengan mismatch (gapping) berada dalam posisi aman.
- ◆ Memonitor pencapaian target keuntungan yang harus dicapai bank dan memperhitungkan Cost of Fund sebagai salah satu acuan dalam menentukan Base Lending Rate.

4.1.3. Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha

PT. Bank Dipo Internasional kantor pusat dalam kedudukannya sebagai bank umum mempunyai kegiatan usaha yang tidak jauh berbeda dengan kegiatan usaha bank-bank umum lainnya.

Dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992, tugas dan usaha Bank Dipo Internasional tetap diarahkan pada perbaikan ekonomi dan pembangunan ekonomi nasional dengan jalan melakukan usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan.
2. Menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual dan menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri atau nasabahnya.
6. Menempatkan dana pada peminjam dana dari atau meminjamkan dana dari bank lain.
7. Melakukan kegiatan yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.2.1. Analisis Kelayakan Usaha Calon Debitur pada PT. Bank Dipo Internasional

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan bank selain menghimpun dana. Kegiatan pemberian kredit dalam istilah bank

dikenal dengan pengalokasian dana. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai asset yang dianggap dapat menguntungkan bagi bank.

Kegiatan pemberian kredit ini merupakan kegiatan atau fasilitas yang diberikan oleh bank kepada masyarakat. Dengan tujuan untuk membantu nasabah yang memerlukan dana baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara pihak bank dengan pihak nasabah.

Dalam pemberian kredit atau pengalokasian dana kemasyarakat, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian serta selalu waspada dan harus sesuai dengan peraturan perbankan agar tidak merugikan kedua belah pihak. Hal ini dilakukan karena kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung risiko yang sangat tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan serta kelangsungan usaha bank tersebut.

Dari latar belakang tersebut maka dalam proses pemberian kredit hendaknya dilakukan suatu analisis terhadap kelayakan usaha calon debitur. Analisis ini bertujuan untuk dapat mengetahui apakah calon debitur dapat dikatakan layak atau tidak untuk mendapatkan kredit. Pihak bank sangat perlu melakukan analisis terhadap kelayakan usaha calon debitur yang bertujuan untuk menghindari dan meminimalisasikan terjadinya kredit yang bermasalah yang nantinya akan mengarah kepada kredit macet.

Dalam melakukan penilaian kredit, pihak bank harus berpedoman pada kebijakan kredit yang mengatur tentang syarat-syarat pengajuan kredit, termasuk jumlah saldo pengimbang dalam rekening, laporan hasil usaha dan mutasi rekening 6 bulan terakhir, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Usaha dan Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), serta keabsahan surat-surat yang dijamin.

Dalam melakukan analisis kelayakan usaha calon debitur, maka pihak bank harus mengetahui dan menilai tentang aspek-aspek yang mempengaruhi kelayakan suatu usaha serta melakukan penilaian terhadap laporan keuangan calon debitur.

Dalam menilai suatu kelayakan usaha, dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek dimana setiap aspek saling berkaitan satu sama lain. Aspek-aspek tersebut harus diperhatikan dalam melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kelayakan dari suatu usaha. Aspek-aspek tersebut adalah:

1. Aspek Pasar

Penilaian yang pertama atau yang mendasar adalah penilaian terhadap aspek pasar. Penilaian terhadap aspek pasar merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu produksi. Karena tidak ada usaha yang berhasil tanpa adanya permintaan atas barang dan jasa yang dihasilkan dari usaha tersebut. Tujuan dilakukan penilaian terhadap aspek pasar adalah untuk

mengetahui seberapa besar luas pasar yang dikuasai, pertumbuhan permintaan dari produk yang dihasilkan dan pangsa pasar (*market share*) dari produk tersebut.

Dari hasil penilaian terhadap aspek pasar tersebut akan didapat suatu informasi atau keterangan apakah produk yang dihasilkan dapat diterima dan dapat bersaing dipasaran. Selain itu juga untuk mengetahui perkembangan yang terjadi dari penjualan produk tersebut. Hasil dari penilaian terhadap aspek pasar ini dapat sangat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh bank apakah usaha dari calon debitur ini layak atau tidak untuk dapat diberikan kredit.

2. Aspek Internal Perusahaan

Dalam aspek internal perusahaan ini dibagi menjadi beberapa aspek yaitu:

a. Aspek Hukum

Dalam aspek ini yang dinilai adalah mengenai masalah legalitas badan usaha tersebut serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang mengajukan kredit. Penilaian dimulai dengan akte pendirian perusahaan, sehingga dapat diketahui pemilik perusahaan dan besarnya modal yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang menyebabkan kredit tersebut bermasalah.

b. Aspek Pemasaran

Dalam aspek pemasaran yang dinilai adalah bagaimana proses pemasaran yang dilakukan perusahaan untuk memasarkan dan mengenalkan barang atau jasa yang diproduksi ke masyarakat. Oleh karena itu, aspek ini bertanggung jawab dalam menentukan ciri-ciri pasar yang akan dipilih. Karena dengan pemasaran yang baik akan mempengaruhi tingkat permintaan dan perkembangan dari suatu produk yang dihasilkan. Tingkat permintaan yang meningkat dan berkembangnya produk tersebut dipasaran akan mempengaruhi kelangsungan usaha tersebut dalam menghasilkan suatu keuntungan dan target pasar yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

c. Aspek Teknis dan Teknologi

Penilaian terhadap aspek teknis dan teknologi akan mengungkapkan kebutuhan yang diperlukan dan bagaimana secara teknis proses produksi akan dilaksanakan. Aspek teknologi termasuk perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Seperti penentuan kapasitas produksi, jenis teknologi yang digunakan, pemakaian peralatan dan mesin, serta lokasi proyek dan letak pabrik yang sangat menguntungkan. Hal-hal tersebut dapat sangat menguntungkan dalam pembuatan suatu produk. Contohnya seperti: dengan menggunakan mesin yang modern akan

mempercepat proses produksi sehingga jumlah yang dihasilkan akan lebih besar. Selain itu juga dapat meningkatkan mutu dari suatu produksi.

d. Aspek Sumber Daya Manusia

Penilaian terhadap aspek sumber daya manusia juga penting untuk dilakukan, Karena kualitas sumber daya manusia dapat berpengaruh terhadap pembangunan dan perkembangan usaha serta dalam operasional rutin usaha.

e. Aspek Manajemen

Penilaian terhadap aspek manajemen adalah menilai organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Pengalaman perusahaan dalam mengelola berbagai proyek yang ada dan pertimbangan lainnya.

Penilaian aspek manajemen sangat penting dilakukan pada saat pembangunan proyek dan pada saat usaha tersebut telah dioperasionalkan secara rutin. Hal ini dikarenakan banyak terjadi usaha yang gagal dioperasionalkan bukan disebabkan oleh aspek lain, tetapi karena lemahnya sistem manajemen yang dimiliki perusahaan tersebut.

f. Aspek Keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana atau perputaran modal dalam usahanya.

Suatu usaha dapat dikatakan sehat apabila dapat memberikan keuntungan yang layak dan mampu memenuhi kewajiban finansialnya. Kegiatan pada aspek finansial ini antara lain menghitung perkiraan jumlah dana yang diperlukan untuk keperluan modal kerja awal dan untuk pengadaan harga tetap usaha.

3. Aspek Persaingan dan Lingkungan Eksternal

Aspek persaingan dan lingkungan eksternal ini meliputi kondisi yang ada diluar perusahaan yang bersifat dinamis dan tidak dapat dikendalikan. Kondisi yang dimaksud adalah risiko yang harus dihadapi dari sifat usaha tersebut serta risiko terhadap persaingan yang akan timbul dari perusahaan yang sejenis. Karena risiko usaha tidak dapat dikendalikan tetapi dapat dihindari atau dicegah.

Selain menilai aspek-aspek yang mempengaruhi kelayakan usaha, bank juga harus melakukan penelitian dan penilaian terhadap kinerja keuangan calon debitur.

Penilaian terhadap kinerja keuangan sangat penting, karena dapat mengetahui keadaan keuangan calon debitur serta untuk menghindari agar kredit tersebut tidak jatuh kepada orang yang salah. Yang nantinya akan menjadi kredit yang bermasalah yang mengarah kepada kredit macet. Dalam penilaian kinerja keuangan diusahakan agar diperoleh laporan keuangan yang sudah diaudit, agar auditor dapat memberikan pandangan yang bebas tentang

keuangan calon debitur sebagai hasil dari pemeriksaan terhadap pembukuan calon debitur yang akan mempengaruhi dalam mengambil keputusan pemberian kredit apakah layak atau tidak untuk dapat diberikan kredit.

Metode penilaian yang sering digunakan dalam menilai kinerja keuangan adalah dengan menggunakan analisis perbandingan. Analisis perbandingan ini terbagi menjadi dua metode yaitu:

1. Analisis Vertikal

Analisis vertikal ini adalah analisis yang dilakukan dengan membandingkan kegiatan suatu usaha secara absolute maupun relative atas bagian kegiatan yang ada dengan kegiatan pada periode sebelumnya.

Dari analisis ini maka akan diperoleh suatu kesimpulan apakah telah terjadi perubahan baik kenaikan atau penurunan dari usaha tersebut. Dalam analisis ini dipakai data selama dua tahun secara berurutan agar dapat dibandingkan satu sama lain.

2. Analisis Horizontal

Dalam analisis horizontal menggambarkan hubungan dan perimbangan antara suatu pos atau kelompok pos yang lain baik yang tercantum dalam neraca maupun dalam laporan laba-rugi.

Dalam analisis ini data yang dipakai hanya satu tahun saja.

Hasil wawancara dengan pihak Bank Dipo menginformasikan metode yang digunakan dalam penilaian laporan keuangan adalah analisis vertikal. Karena dalam analisis vertikal dipakai laporan

keuangan yang berurutan atau laporan keuangan selama tiga tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk melakukan perbandingan dari setiap laporan keuangan apakah menunjukkan suatu perkembangan atau tidak dalam usahanya. Hal ini dapat membantu pihak bank untuk mengambil keputusan dalam proses pemberian kredit.

Dalam proses pengambilan keputusan atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur, hendaknya bank juga harus memperhatikan dan memiliki prinsip-prinsip pertimbangan kredit yang memadai. Dimana yang termasuk dalam prinsip pertimbangan adalah penilaian terhadap:

1. Character

Dalam hal ini bank mencari data tentang sifat-sifat pribadi calon debitur, bentuk usaha yang didirikan, watak dan kejujuran dari pimpinan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya.

Informasi yang lain perlu diketahui oleh bank adalah apakah calon debitur termasuk dalam daftar hitam. Untuk mendapatkan informasi tersebut dengan akurat dan dapat dipercaya pihak bank dapat bekerjasama dengan para karyawan, kepolisian, dan dari Bank Indonesia, ataupun dari bank lainnya.

Hal ini dilakukan oleh bank dengan tujuan untuk menghindari kredit yang bermasalah dan bertujuan untuk mengetahui bahwa kredit yang diberikan aman dan dapat diterima kembali dimasa yang akan datang oleh bank. Dengan kata lain agar kredit

tersebut tidak jatuh kepada orang menyalah gunakan pemberian kredit tersebut.

2. *Capability to pay/ cash flow.*

Yang dimaksud disini adalah menyangkut pimpinan perusahaan beserta dengan para stafnya baik kemampuan dalam manajemen maupun dalam keahlian-keahliannya dalam bidang usahanya.

Capability merupakan penilaian untuk mengetahui kemampuan perusahaan calon penerima kredit untuk membayar kembali dan dalam melaksanakan rencana kerjanya diwaktu yang akan datang dalam hubungannya dengan penggunaan kredit yang telah diberikan.

Contoh penilaian dalam kemampuan membayar adalah:

Dengan mengoperasikan 30 unit Dumptruk yang telah dimilikinya (tidak terikat sebagai jaminan di bank maupun leasing) ditambah dengan 4 unit Dumptruk tambahan yang dibiayai melalui fasilitas yang diajukan ini maka, pendapatan debitor per bulan adalah sebagai berikut:

34 unit * Rp 70.000,-/jam * 8 jam * 25 hari =	Rp 476.000.000,-
Biaya operasional 40% * Rp 476.000.000	= Rp 190.400.000,-
Biaya lain yang tak terduga 10%	= Rp 47.600.000,-

Pendapatan per bulan sebelum pajak dan

Biaya umum dan Administrasi	Rp 238.000.000,-
-----------------------------	------------------

Hasil ini cukup untuk memenuhi kewajiban angsuran untuk fasilitas ini sebesar Rp 58.000.000,-/ bulan selama 24 bulan.

3. *Capital*

Penilaian modal ini sangat penting untuk dilakukan karena dengan melakukan penilaian terhadap modal dapat diketahui apakah calon debitur memiliki modal yang cukup memadai untuk dapat menjalankan dan menjaga kelangsungan hidup usahanya tersebut.

Semakin besar jumlah modal yang ditanam dalam usaha yang dibiayai oleh bank dapat menunjukkan tingkat keseriusan debitur dalam menjalankan usahanya tersebut. Karena semakin besar jumlah modal yang ditanamkan, maka tingkat risiko yang akan dihadapi akan semakin tinggi.

4. *Collateral*

Penilaian terhadap barang jaminan juga merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan pemberian kredit. Penilaian barang jaminan adalah untuk menunjukkan besarnya aktiva yang akan diikatkan atau dijadikan jaminan atas kredit yang diberikan oleh bank.

Dalam hal ini, jaminan yang diserahkan kepada bank harus sah atau harus benar-benar dimiliki oleh calon debitur. Dalam penilaian barang jaminan tidak semua barang jaminan dapat diterima atau disetujui oleh bank. Biasanya bank akan menerima atau menyetujui barang jaminan tersebut setelah melihat nilai

dari jaminan tersebut apakah sesuai dengan jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur. Apabila barang jaminan tersebut berupa sertifikat dari sebuah rumah atau sebidang tanah maka pihak bank harus melihat letak dari barang jaminan tersebut. Hal ini dilakukan apabila calon debitur tidak dapat melunasi hutangnya maka barang jaminan tersebut akan diambil alih oleh bank. Karena alasan tersebut maka bank harus melihat nilai atau letak dari barang jaminan tersebut agar mudah dijual dan memiliki nilai yang lebih.

Contoh penilaian terhadap barang jaminan.

Jaminan untuk fasilitas ini berbentuk tanah dan bangunan rumah tinggal dengan luas LT/LB 350 m²/400 m² berupa sertifikat hak milik (SHM) atas nama Susana (40 tahun) yang merupakan istri dari debitur.

Jaminan ini merupakan rumah tinggal debitur dan keluarganya semenjak tahun 1985 (17 tahun) dan berlokasi dilingkungan perumahan Cemara Garden Real Estate, Jakarta Barat. Penilaian (appraisal) dilakukan oleh tim Bank Dipo Internasional (terlampir) dengan hasil MV Rp. 900 juta dan LV Rp. 630 juta (70%).

Menurut kami penilaian ini sangat konservatif dan kami berpendapat bahwa nilai pasar untuk jaminan ini minimal adalah sebesar Rp. 1.200 juta pada saat ini, karena berdasarkan hasil site visit, kondisi fisik bangunan dan juga lingkungan dapat

4.2.2. Risiko Kredit Macet pada PT. Bank Dipo Internasional

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang paling tinggi tingkat risikonya. Dalam kegiatan pemberian kredit banyak risiko yang akan dihadapi oleh bank, hal ini terjadi karena beragamnya jenis usaha yang ada di masyarakat yang menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Dari kebutuhan dana yang beragam ini menyebabkan jenis kredit yang beragam dan sesuai dengan kebutuhan dana yang diinginkan oleh para debitur.

Dari berbagai macam jenis kredit yang diberikan oleh bank, maka tanpa disengaja akan timbul pula berbagai jenis risiko kredit yang akan dihadapi oleh bank dalam kegiatan pemberian kredit.

Jenis-jenis risiko kredit yang harus dipahami adalah:

1. Risiko dari Sifat Usaha

Risiko dari sifat usaha adalah risiko yang ditimbulkan dari sifat usaha tersebut. Sifat risiko yang dihadapi oleh suatu usaha berbeda dengan usaha yang lainnya. Dari sifat-sifat usaha tersebut dapat diketahui tingkat tinggi rendahnya risiko usaha dengan kriteria antara lain:

- A. *Turn over* usaha makin tinggi maka tingkat risiko yang dihadapi akan semakin tinggi.
- B. Tingkat spesifikasi usaha, semakin khusus bidang usaha yang dijalani maka akan semakin tinggi pula tingkat risiko yang akan dihadapi.

- C. Investasi pada aktiva lancar modal atau kerja, semakin besar investasi yang ditanamkan pada modal kerja maka risiko akan semakin tinggi dibandingkan dengan usaha yang investasi terhadap barang-barang modal.
- D. Usaha dengan modal yang besar pada negara berkembang akan mempunyai risiko yang lebih besar dibandingkan dengan usaha yang lebih banyak mengerahkan tenaga daripada modal yang besar.
- E. Risiko yang timbul karena sifat dari usaha itu sendiri yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi.

2. Risiko Ketidakpastian

Faktor ketidakpastian akan menimbulkan spekulasi. Setiap usaha yang bersifat spekulasi biasanya mempunyai tingkat risiko yang tinggi. Karena segala sesuatunya tidak dapat direncanakan dan dikendalikan sebelumnya dengan baik.

3. Risiko Inflasi

Bentuk risiko lain yang akan dihadapi oleh bank adalah bentuk risiko yang bersifat abstrak adalah risiko yang terjadi karena adanya inflasi walaupun hutang pokok telah dibayar lunas lunas, tetapi apabila terjadi masa inflasi tinggi bank mengalami penurunan daya beli rupiah yang dipinjamkan kepada debitur.

Untuk mengatasi masalah ini maka *time value of money* tersebut perlu diperhitungkan dalam *cost of fund* atau *cost of money* serta dalam *cost of borrowing fund*. Hal ini dilakukan agar bank tidak

mengalami kerugian penurunan daya beli assetnya yang disalurkan dalam bidang perkreditan.

4. Risiko Persaingan

Dalam suatu usaha risiko yang tidak dapat dihindari adalah risiko persaingan. Karena untuk memasuki pasar, setiap jenis usaha harus mampu bersaing dan bertahan dengan perusahaan sejenis yang menjadi objek perkreditan. Oleh karena itu risiko persaingan ini harus diperhitungkan dengan baik. Dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih.

Kemungkinan risiko-risiko kredit tersebut dapat terjadi sangat tinggi dalam kegiatan pemberian kredit. Risiko kredit tersebut harus dihadapi oleh bank, apabila kredit yang disalurkan atau diberikan mengalami masalah atau sudah tergolong kedalam kredit yang bermasalah atau kredit yang mengarah kepada kredit macet. kredit yang bermasalah atau kredit macet dapat terjadi apabila kredit tersebut telah jatuh tempo dan debitur tidak dapat lagi membayar angsuran pokok dan atau bunganya dan telah melampaui 270 hari.

Hal ini dialami oleh PT. Bank Dipo Internasional dalam kegiatan pemberian kredit pada tahun 2000 yang tergolong kedalam kredit yang bermasalah adalah untuk kredit yang kurang lancar adalah sebesar Rp 8.221.000.000, untuk kredit yang diragukan adalah sebesar Rp 4.000.000, dan untuk kredit macet adalah sebesar Rp 11.730.000.000 dengan Rasio keuangan untuk kredit yang bermasalah dan macet pada tahun 2000 adalah sebesar 10,42%

Pada tahun 2001 untuk kredit yang kurang lancar adalah sebesar Rp 1.718.000.000, untuk kredit yang diragukan adalah sebesar Rp 3.251.000.000, dan untuk kredit macet adalah sebesar Rp 15.254.000.000 dengan Rasio keuangan untuk kredit yang bermasalah pada tahun 2001 adalah sebesar 8,26%.

Sedangkan untuk tahun 2002 untuk kredit yang kurang lancar adalah sebesar Rp 3.414.000.000, untuk kredit yang diragukan adalah sebesar Rp 2.469.000.000, dan untuk kredit macet adalah sebesar Rp 8.319.000.000 dengan Rasio keuangan untuk kredit yang bermasalah pada tahun 2002 adalah sebesar 4,68%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5

Aktiva Produktif yang bermasalah tahun 2000 – 2002

(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Rasio
2000	8.221	4	11.730	10,42%
2001	1.718	3.251	15.254	8,26%
2002	3.414	2.469	8.319	4,68%

Sumber: PT. Bank Dipo Internasional

Dari data tersebut dapat dilihat adanya kenaikan dan penurunan yang terjadi pada aktiva produktif yang bermasalah atau dalam kegiatan pemberian kredit. Hal ini disebabkan analisis kelayakan usaha terhadap calon debitur yang berjalannya kurang maksimal. Untuk aktiva produktif yang bermasalah pada Bank Dipo hanya berasal dari kredit. Hal ini terlihat pada laporan keuangan Bank Dipo selama tiga tahun terakhir yaitu tahun 2000 - 2002.

Analisis kelayakan usaha ini belum dapat berjalan dengan maksimal, dikarenakan penilaian terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi kelayakan usaha tersebut serta penilaian terhadap kinerja laporan keuangan belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat pada penilaian kinerja laporan keuangan. Dalam persyaratan kredit calon debitur wajib untuk melampirkan data laporan keuangan selama tiga tahun terakhir untuk dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak bank dalam mengambil keputusan. Tetapi dalam praktiknya pihak calon debitur sering tidak melampirkan data laporan keuangan tersebut dan pihak bank tidak mempersoalkan masalah tersebut. Dari penyimpangan yang terjadi dapat menghambat untuk meminimalkan terjadinya kredit macet karena analisis kelayakan usaha yang dilakukan belum maksimal.

Selain itu ada banyak alasan atau penyebab terjadinya kredit yang bermasalah atau kredit macet antara lain adalah:

1. Penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan

Dalam pelaksanaan prosedur perkreditan sering terjadinya penyimpangan. Hal ini disebabkan karena para pejabat bank kurang disiplin dan tidak mengikuti aturan dalam prosedur perkreditan sesuai dengan pedoman dan tata cara pemberian kredit dalam suatu bank. Hal ini dapat terlihat pada tindakan bank tidak mewajibkan calon debitur membuat studi kelayakan usaha dan tidak mewajibkan calon debitur menyampaikan data keuangan minimal tiga tahun terakhir secara lengkap. Atau

sering juga terjadi pihak bank tidak mewajibkan calon debitur melampirkan laporan keuangan dalam syarat pengajuan kredit. Penyimpangan yang terjadi disebabkan oleh pengendalian intern yang berjalan kurang maksimal.

Penyimpangan sistem dan prosedur perkreditan yang terjadi biasanya disebabkan oleh menurunnya kualitas dari sumber daya manusia, khususnya yang menangani masalah perkreditan yang kurang memadai atau karena pengendalian intern yang kurang berjalan dengan maksimal. Selain itu, salah satu penyebab timbulnya kredit yang bermasalah atau kredit macet adalah dari sisi intern bank yang sangat dominan dalam pemutusan pemberian kredit.

2. Lemahnya sistem pengawasan dan informasi kredit

Lemahnya system pengawasan dan informasi kredit merupakan salah satu penyebab terjadinya kredit macet. Lemahnya sistem pengawasan kredit dapat terlihat dari dokumen kredit atau persyaratan dalam pengajuan kredit yang seharusnya dilengkapi oleh debitur sebagai syarat dalam pengajuan kredit tetapi tidak dilakukan oleh bank, berkas perkreditan yang tidak lengkap dan tidak teratur, pemantauan usaha yang tidak dilakukan secara rutin, termasuk peninjauan langsung pada lokasi usaha debitur secara rutin atau secara periodik. Lemah dan longgarnya sistem pengawasan kredit menyebabkan kredit yang potensial akan mengalami masalah, dan tidak dapat diketahui dan dilacak sejak

dini sehingga bank terlambat melakukan langkah-langkah penyelamatan yang menyebabkan bank mengalami kredit macet. Lemahnya sistem informasi kredit juga termasuk kedalam salah satu faktor pendukung terjadinya kredit yang bermasalah atau kredit macet. Sistem informasi kredit yang tidak berjalan dengan semestinya akan menghambat serta meragukan keakuratan dalam pelaporan bank yang mempengaruhi untuk melakukan deteksi secara dini. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya pengambilan langkah-langkah penyelamatan yang diperlukan oleh bank dalam mencegah terjadinya kredit yang bermasalah atau kredit macet.

3. Penyimpangan dalam pemakaian fasilitas kredit oleh debitur

Penyimpangan dalam pemakaian fasilitas kredit oleh debitur merupakan salah satu factor utama penyebab kredit macet selain kegagalan usaha debitur. Penyimpangan yang terjadi adalah debitur menyalahgunakan kredit yang telah diberikan oleh bank. Pada saat debitur menerima kredit dari bank, kredit tersebut tidak dipergunakan oleh debitur untuk kelancaran usaha yang sedang dijalani oleh debitur melainkan untuk usaha baru yang didirikan oleh debitur. Dalam usaha debitur yang baru tersebut, debitur mengalami masalah dalam usahanya sehingga usaha baru tersebut tidak dapat bersaing di pasaran, tidak dapat menghasilkan laba atau keuntungan. Setelah usaha tersebut mengalami masalah dan tidak menghasilkan keuntungan maka

akan mempengaruhi debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya, yang pada akhirnya menyebabkan kredit yang diberikan bermasalah.

4. Kegagalan usaha debitur

Kegagalan usaha debitur merupakan faktor utama penyebab terjadinya kredit yang bermasalah yang mengarah kepada kredit macet. Hal ini terjadi karena debitur mengalami kegagalan dalam usahanya. Apabila debitur mengalami kegagalan dalam usaha, maka debitur akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, yang pada akhirnya kredit tersebut bermasalah. Kegagalan usaha debitur ini dapat terjadi karena debitur mengalami musibah (bencana alam) dalam usahanya atau karena usaha debitur tidak dapat lagi bersaing lagi dipasaran, sehingga usaha debitur tidak dapat menghasilkan laba atau keuntungan. Usaha debitur yang sering mengalami masalah dan menyebabkan kredit yang diberikan oleh bank mengalami masalah adalah usaha dalam bidang perdagangan dan jasa-jasa dunia usaha.

Berdasarkan informasi yang didapat dari PT. Bank Dipo Internasional terlihat adanya penurunan dari jumlah kredit macet atau kredit yang bermasalah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Hal tersebut dapat dilihat dari prosentase kredit macet atau kredit yang bermasalah dengan cara membandingkan total kredit

macet dengan total kredit kredit yang diberikan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2002.

Tabel 6.

Informasi Prosentase Kredit Macet Tahun 2000-2002

Tahun	Total Kredit	Kredit Macet	Prosentase Kredit
2000	191.397.000.000	19.955.000.000	10,42%
2001	244.748.000.000	20.223.000.000	8,26%
2002	303.031.000.000	14.202.000.000	4,68%

Dari data prosentase kredit macet pada PT. Bank Dipo Internasional tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 dapat di informasikan dari jumlah kredit macet yang dialami PT. Bank Dipo Internasional disebabkan oleh kegagalan usaha debitur dan penyimpangan pemakaian fasilitas kredit serta penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan dan lemahnya sistem pengawasan dan informasi kredit yang lemah.

Tahapan-tahapan tersebut perlu dilakukan oleh pihak bank untuk mengantisipasi risiko kredit macet. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut maka pihak bank harus memperhatikan kelayakan usaha calon debitur serta aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pemberian kredit serta hal-hal lainnya yang termasuk dalam asas perkreditan yang sehat.

4.2.3. Manfaat Analisis Kelayakan Usaha Calon Debitur Terhadap Risiko Kredit Macet

Bank sebagai lembaga yang berfungsi sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang mengatur dan memperlancar arus lalu lintas pembayaran. bank mempunyai dua kegiatan utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit atau pinjaman.

Kegiatan menyalurkan dana atau kegiatan pemberian kredit mempunyai tingkat risiko yang sangat tinggi. Risiko yang harus dihadapi dalam kegiatan pemberian kredit ini adalah apabila kredit yang disalurkan atau yang diberikan mengalami masalah. Kredit yang bermasalah atau kredit macet adalah masalah yang sangat serius bagi bank dan perlu mendapatkan perhatian khusus.

Oleh karena itu, dalam menghindari terjadinya kredit yang bermasalah atau kredit macet, bank harus ekstra hati-hati dalam mengambil keputusan terhadap persetujuan kredit calon debitur. Bank juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit serta aspek-aspek dalam penilaian kredit dan hal lainnya yang termasuk dalam asas perkreditan yang sehat.

Tindakan yang perlu dilakukan oleh bank untuk menghindari dan meminimalisasikan tingkat terjadinya kredit yang bermasalah atau kredit macet, bank perlu melakukan penelitian terhadap kelayakan usaha calon debitur. Kelayakan usaha calon debitur ini

mencakup latar belakang perusahaan, prospek usahanya, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan dilakukannya penilaian terhadap kelayakan usaha calon debitur adalah agar bank merasa yakin akan kredit yang diberikan benar-benar aman dan dapat diterima kembali dimasa yang akan datang.

Tujuan lain dilakukannya penilaian terhadap kelayakan usaha ini adalah untuk menilai kelayakan suatu gagasan usaha dan hasil dari penilaian ini merupakan pertimbangan apakah usaha tersebut dapat dikategorikan kedalam usaha yang layak atau tidak layak untuk mendapatkan kredit.

Dalam analisis kelayakan usaha ini mencakup berbagai hal. Dimulai dari penilaian terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi kelayakan usaha tersebut sampai dengan penilaian terhadap kinerja keuangan calon debitur.

Harapan dari dilakukannya analisis kelayakan usaha ini adalah untuk menghindari dan meminimalisasikan tingkat risiko yang timbul dari kredit yang bermasalah atau dari kredit macet. Karena akibat dari kredit yang bermasalah dan kredit macet bukan hanya berakibat bagi bank tetapi berakibat juga bagi nasabah yang menunggak. Kredit yang bermasalah atau kredit macet dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Bank yang kesehatannya terganggu akan sulit untuk dapat melayani permintaan para debiturnya.

Jika analisis kelayakan usaha calon debitur selalu dilakukan dengan benar dan berjalan secara maksimal dalam kegiatan pemberian kredit, maka diharapkan dapat mengurangi tingkat risiko yang akan dihadapi oleh bank dalam mengatasi masalah kredit macet. Dengan meminimalkan risiko yang terjadi dapat membantu dalam meningkatkan pendapatan bank melalui sektor kredit.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan umum

1. PT Bank Dipo Internasional merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang perbankan.
2. PT Bank Dipo Internasional berlokasi di gedung wisma sejahtera yang beralamat di jalan Letnan Jenderal S. Parman kav 75 Jakarta.
3. PT Bank Dipo Internasional telah menyalurkan kredit sebagai salah satu kegiatan umum perbankan.
4. Kredit bermasalah yang dialami oleh PT Bank Dipo Internasional selama tahun 2000 sampai dengan 2002 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menghasilkan perubahan kearah yang lebih baik.

5.1.2. Simpulan Khusus

Dari pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis kelayakan usaha calon debitur pada PT Bank Dipo Internasional cukup berjalan dengan baik namun masih belum optimal. Hal ini terlihat dari jumlah kredit yang bermasalah dan kredit yang macet pada PT. Bank Dipo Internasional sepanjang

tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 yang masih terjadi namun mengalami penurunan. Tetapi masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam melakukan penilaian dalam aspek-aspek yang mempengaruhi kelayakan usaha tersebut serta dalam melakukan penilaian terhadap laporan keuangan calon debitur. Penyimpangan tersebut terjadi karena pihak intern bank dalam melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi kelayakan usaha serta dalam melakukan penilaian laporan keuangan debitur tidak sesuai dengan asas perkreditan dan peraturan yang berlaku.

2. Bank Dipo dalam kegiatan pemberian kredit menghadapi risiko kredit. Kemungkinan risiko-risiko kredit ini sangat tinggi. Risiko tersebut harus dihadapi oleh Bank. Apabila kredit yang disalurkan mengalami masalah atau sudah tergolong ke dalam kredit yang bermasalah atau kredit yang mengarah kepada kredit macet, maka hal ini merupakan indikasi adanya risiko kredit. Kredit macet disebabkan oleh beberapa faktor atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Penyimpangan yang terjadi biasanya dalam hal pelaksanaan prosedur perkreditan, lemahnya system pengawasan dan informasi kredit, penyimpangan dalam pemakaian fasilitas kredit serta kegagalan usaha debitur.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan pada halaman sebelumnya, maka penulis memberikan saran kepada pihak perusahaan agar bertujuan agar pada waktu yang akan datang analisis kelayakan usaha terhadap calon debitur akan berjalan dengan maksimal.

Saran yang dianjurkan oleh penulis berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, sebagai berikut:

1. Perusahaan perlu melakukan peninjauan langsung pada lokasi usaha debitur secara rutin atau secara periodik.
2. Dalam prosedur pemberian kredit, pihak intern harus mematuhi peraturan perkreditan. Untuk pihak intern yang melanggar peraturan perkreditan harus diberi sanksi yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan agar tidak merusak peraturan perkreditan.
3. Perusahaan perlu melakukan pendidikan dan pelatihan khususnya untuk bagian kredit. Hal ini bertujuan untuk memberikan tambahan pengetahuan mengenai informasi kredit.
4. Dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap parta petugas bank terutama bagian kredit dan diberikan sanksi atau penghargaan (*reward*) atas kinerja mereka agar semakin termotivasi dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya.

Dengan saran yang dianjurkan oleh penulis, maka penulis berharap bahwa untuk analisis kelayakan usaha terhadap calon debitur pada perusahaan berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, D Joseph., Timothy J. Gallagher. 1997. *Financial Management. Internasional Edision*. Prentice-Hall Inc, New Jersey.
- Astiko, Sunardi. 1996. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Brigham, Eugene F., Louis C. Gapenski. 1997. *Financial Management Theory And Practice*. Eight Edition. The Dryden Press, Florida.
- C. Handoyo Wibisono. 1997. *Manajemen Modal Kerja*. Edisi 3. Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Dahlan Siamat. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Edisi 3. FEUI, Yogyakarta.
- Encyclopedia of Proffesional Management volume I. 1996*
- Eny Pudjiastuti, Suad Husnan. 1998. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 2. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Gatot Supramono. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Edisi Revisi. Djambatan, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Syafr. 1999. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Husein Umar. 1999. *Studi Kelayakan Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Husein Umar. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. Edisi 2. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kasmir. 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi Cet-4. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kusnadi, Moch. Ichsan, M. Syaifi. 2000. *Studi Kelayakan Proyek Bisnis*. Universitas Brawijaya, Malang.
- Lani Sidharta. 1996. *Sistem Informasi Bisnis*. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Martono, D. Agus Harjito. 2003. *Manajemen Keuangan*. Ekonosia, Yogyakarta.

- Murni Sumarni. 1997. *Marketing Perbankan*. Edisi Revisi. Liberty, Yogyakarta.
- PSAK 31 Laporan Keuangan Perbankan.
- Ruddy Tri Santoso. 1997. *Prinsip Dasar Akuntansi Perbankan*. Edisi 1. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- S. Munawir. 2002. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi 4. Liberty, Yogyakarta.
- Saunders, anthony., Marcia Millon Cornell. 2003. *Financial Institutions Management*. Fourth Edision. Mc-Graw Hill.
- Sigit Triandaru, Sri Susilo. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Salemba Empat, Jakarta.
- Simanjuntak, Payaman. 1997. *Pengantar Evaluasi Proyek*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Siswanto Sutojo. 2000. *Manajemen Kredit Bank Umum*. PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
- Siswanto Sutojo. 2002. *Studi Kelayakan Proyek*. PT. Damar Mulia Pustaka, Jakarta.
- Soemarso. 1997. *Write-Off Kredit Macet Pusat Pengkajian Fiskal-Moneter No. 20*. PT. Bina Rena Pariwisata, Jakarta.
- Suad Husnan. 1998. *Manajemen Keuangan: Teori Dan Penerapan*. Edisi 4. BPFE, Yogyakarta.
- Sukanto Rekso Hadiprodjo, 1996. *Dasar-dasar Manajemen*. Edisi 5. BPFE, Yogyakarta.
- Sutrisno. 2000. *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Ekonisia, Yogyakarta.
- Teguh Pudjo Muljono. 1996. *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*. Edisi Revisi 3. Djambatan, Jakarta.
- Undang-undang RI No. 10 Th 1998 Tentang Perbankan.
- Weston, J Fred., Thomas E. Copeland. 1996. *Manajemen Keuangan*. Alih Bahasa: Jaka Wasana dan Kibrandoko. Binarupa Aksara, Jakarta.
- Yacob Ibrahim. 2003. *Studi Kelayakan Bisnis*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Zainul Arifin. 2003. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Alvabet, Jakarta.



BANK DIPO

INTERNASIONAL

Landasan Kepercayaan Usaha Anda

Wisma Sejahtera

Jalan Let. Jen. S. Parman Kav. 75

Jakarta 11410 - Indonesia

Phone : (021) 5306360 (Hunting)

Fax : (021) 5306370

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Mujianto
Jabatan : Personalia PT. Bank Dipo Internasional

Menerangkan bahwa :

Nama : Renatha Patrizia
NRP/NIM : 022101287
Status : Mahasiswa Program Studi S-1
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Pakuan Bogor

Telah melakukan riset di PT. Bank Dipo Internasional dari bulan Oktober s/d Desember 2005 dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul :

"Manfaat Analisis Kelayakan Usaha Calon Debitur Terhadap Risiko Kredit Macet Pada PT. Bank Dipo Internasional"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 7 Februari 2006
PT. Bank Dipo Internasional



(Mujianto)
Personalia

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a : Renatha Patrizia
Nomor Mahasiswa : 022101287
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan benar saya telah menghubungi perusahaan yang akan saya riset, dan dari pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/ observasi tersebut.

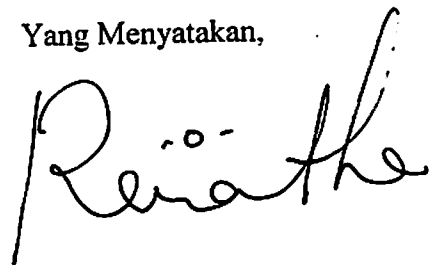
Adapun dari pihak perusahaan yang menerima:

N a m a : Mujianto
Jabatan : Personalia
Perusahaan : PT. Bank Dipo Internasional
Lokasi Perusahaan : Jl. Letnan Jenderal S. Parman Kav 75 Jakarta
Waktu Penelitian : Oktober – Desember 2006

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, 7 Februari 2006

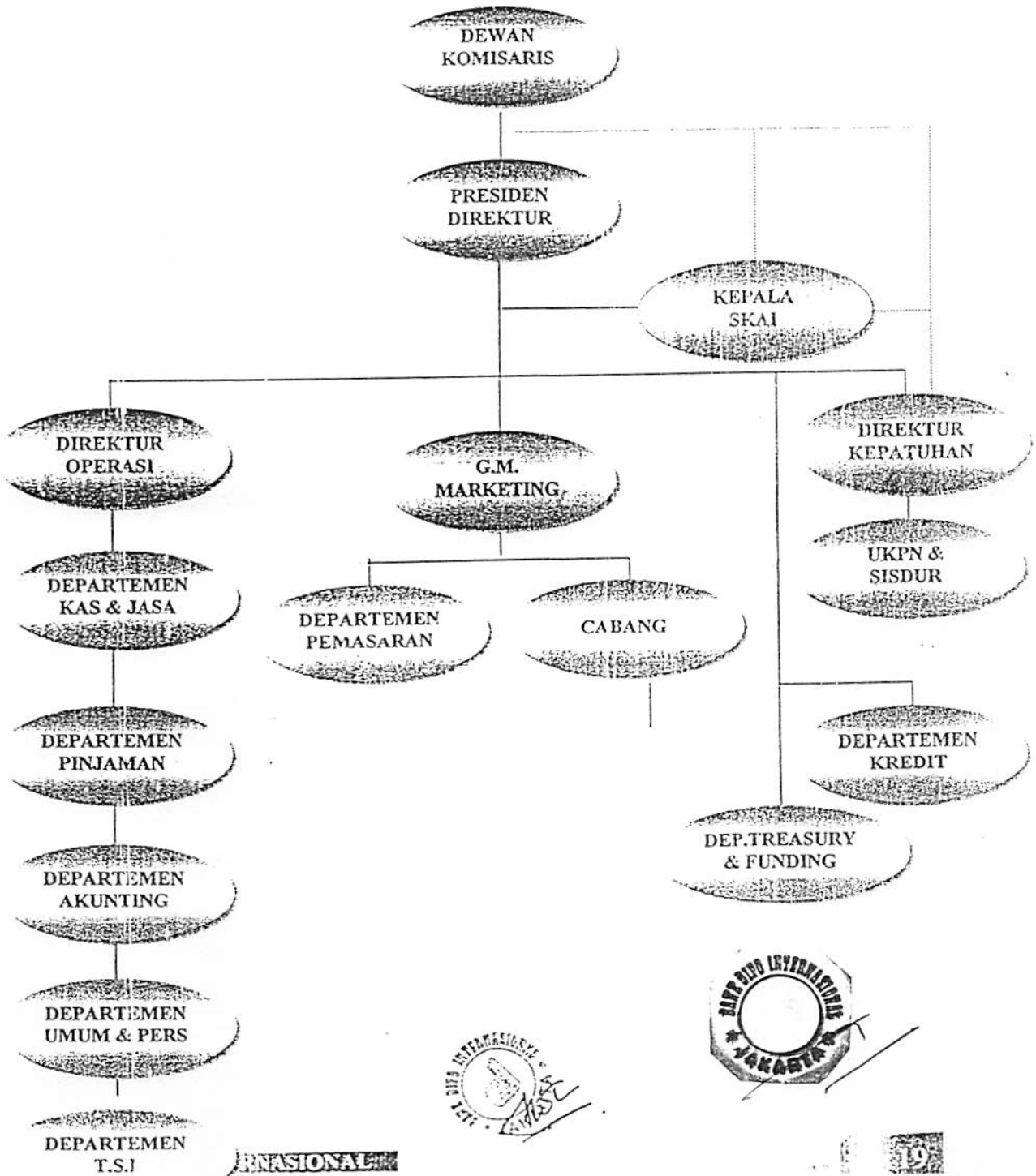
Yang Menyatakan,



(Renatha Patrizia)

LAPORAN MANAJEMEN.

Struktur Organisasi



Lampiran 4

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Bank											
		31 Desember 2001					31 Desember 2000						
		L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
A.	Pihak Terkait												
1	Penempatan pada bank lain												
2	Surat berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia												
3	Kredit kepada pihak ketiga												
	a. KUK	406					406	47					47
	b. Kredit Properti												
	I . Direstrukturisasi												
	ii. Tidak direstrukturisasi												
	c. Kredit lain yang direstrukturisasi												
	d. Lainnya	736					736	276					276
4	Penyertaraan pada pihak ketiga												
	a. Pada perusahaan keuangan non-bank												
	b. Dalam rangka restrukturisasi kredit												
5	Tagihan lain kepada pihak ketiga												
6	Komitmen dan kontinjensi kepada pihak ketiga	15.000					15.000	15.000					15.000
B.	Pihak Tidak Terkait												
1	Penempatan pada bank lain	16.359					16.359	202					202
2	Surat berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia	35.924					35.924	44.915					44.915
3	Kredit kepada pihak ketiga												
	a. KUK	30.202	1.222	364			31.788	22.650	1.556	125	4		24.335
	b. Kredit Properti												
	I . Direstrukturisasi	680				338	1.018					338	338
	ii. Tidak direstrukturisasi	1.815	109			9.858	11.782	2.669		232		9.858	12.759
	c. Kredit lain yang direstrukturisasi	6.569	2.215	724	2.787	50	12.345	2.581	7.615	3.684			13.880
	d. Lainnya	175.613	6.100	630	464	5.008	187.815	130.333	4.038	4.180		1.534	140.085

4	Penyertaan pada pihak ketiga											
	a. Pada perusahaan keuangan non-bank											
	b. Dalam rangka restrukturisasi kredit											
5	Tagihan lain kepada pihak ketiga											
6	Komitmen dan kontinjensi kepada pihak ketiga	125				125	449					449
	Jumlah	283.429	9.646	1.718	3.251	313.298	219.122	13.209	8.221	4	11.730	252.286
7	PPAP yang wajib dibentuk	2.475	482	66	165	9.341	1.524	541	177		3.198	5.440
8	PPAP yang telah dibentuk	2.475	482	66	165	9.341	1.524	541	177		3.198	5.440
9	Total Asset bank yang dijaminkan:											
	a. Pada Bank Indonesia											
	b. Pada pihak lain											
10	Persentase KUK terhadap total kredit					13,10%						12,70%
11	Persentase Jumlah debitur KUK terhadap total debitur					39,30%						36,10%

KALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYA

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Bank												
		31 Desember 2002						31 Desember 2001						
		L	DPK	KL	D	M	Jumlah	L	DPK	KL	D	M	Jumlah	
A.	Pihak Terkait													
1	Penempatan pada bank lain													
2	Surat berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia													
3	Kredit kepada pihak ketiga	963					963	1.142						1.142
	a. KUK							406						406
	b. Kredit Properti	34					34							
	i. Direstrukturisasi													
	ii. Tidak direstrukturisasi	34					34							
	c. Kredit lain yang direstrukturisasi													
	d. Lainnya	929					929	736						736
4	Penyertaraan pada pihak ketiga													
	a. Pada perusahaan keuangan non-bank													
	b. Dalam rangka restrukturisasi kredit													
5	Tagihan lain kepada pihak ketiga													
6	Komitmen dan kontinjensi kepada pihak ketiga	15.000					15.000	15.000						15.000
B.	Pihak Tidak Terkait													
1	Penempatan pada bank lain	15.500					15.500	16.359						16.359
2	Surat berharga kepada pihak ketiga dan Bank Indonesia	82.951					82.951	35.924						35.924
3	Kredit kepada pihak ketiga	268.552	20.277	3.414	2.469	8.319	303.031	214.879	9.646	1.718	3.251	15.254	244.748	
	a. KUK	38.329	1.622	533	9	10	40.503	30.202	1.222	364			31.788	
	b. Kredit Properti	6.603	34				6.358	2.495	109				10.196	12.800
	i. Direstrukturisasi	200					200	680					338	1.018
	ii. Tidak direstrukturisasi	6.403	34				6.358	1.815	109				9.858	11.782
	c. Kredit lain yang direstrukturisasi	5.668	4.315		2.460	50	12.493	6.569	2.215	724	2.787	50	12.345	
	d. Lainnya	217.952	14.306	2.881		1.901	237.040	175.613	6.100	630	464	5.008	187.815	

4	Penyertaan pada pihak ketiga												
	a. Pada perusahaan keuangan non-bank												
	b. Dalam rangka restrukturisasi kredit												
5	Tagihan lain kepada pihak ketiga												
6	Komitmen dan kontinjensi kepada pihak ketiga	1.456					1.456	125					125
	Jumlah	384.422	20.277	3.414	2.469	8.319	418.901	283.429	9.646	1.718	3.251	15.254	313.298
7	PPAP yang wajib dibentuk	3.016	1.016	321	2	6.690	11.045	2.475	482	66	165	6.153	9.341
8	PPAP yang telah dibentuk	3.016	1.016	321	2	6.690	11.045	2.475	482	66	165	6.153	9.341
9	Total Asset bank yang dijaminan:												
	a. Pada Bank Indonesia												
	b. Pada pihak lain												
10	Persentase KUK terhadap total kredit						13,29%						13,10%
11	Persentase Jumlah debitor KUK terhadap total debitor						38,32%						39,30%

Lampiran 6

PERHITUNGAN LABA-RUGI DAN SALDO LABA KONSOLIDASI

Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2001 dan 2000

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	POS-POS	BANK	
		2001	2000
	<u>Pendapatan dan beban operasional</u>		
1.	Pendapatan Bunga		
	1.1. Hasil Bunga		
	a. Rupiah	47.063	31.593
	b. Valuta Asing		
	1.2. Provisi dan Komisi		
	a. Rupiah	1.024	864
	b. Valuta Asing		
	Jumlah Pendapatan Bunga	48.087	32.457
2.	Beban Bunga		
	2.1. Beban Bunga		
	a. Rupiah	30.460	20.059
	b. Valuta Asing		
	2.2. Komisi dan Provisi		
	Jumlah Beban Bunga -/-	30.460	20.059
	Pendapatan Bunga Bersih	17.627	12.398
3.	Pendapatan Operasional Lainnya.		
	3.1. Pendapatan Provisi, Komisi, fee	610	492
	3.2. Pendapatan transaksi valuta asing		
	3.3. Pendapatan kenaikan nilai surat berharga		
	3.4. Pendapatan Lainnya	359	252
	Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	969	744
4.	Beban (Pendapatan) Penghapusan Aktiva Produktif.	3.905	1.102
5.	Beban Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	16	101
6.	Beban Operasional lainnya.		
	6.1. Beban Administrasi dan umum	3.911	3.780
	6.2. Beban Personalia	4.634	3.557
	6.3. Beban penurunan nilai surat berharga		
	6.4. Beban Transaksi valas		
	6.5. Beban Lainnya	1.230	655
	Jumlah Beban Operasional Lainnya	9.775	7.992
	Laba (rugi) Operasional	4.900	3.947
	Pendapatan (Beban) Non Operasional		
7.	Pendapatan Non Operasional	183	

8.	Beban Non Operasional	109	58
	Pendapatan (Beban) Non Operasional	74	426
9.	Pendapatan / beban Luar Biasa		
10.	Laba / rugi sebelum Pajak Penghasilan	4.974	4.373
11.	Taksiran pajak penghasilan -/-	248	
		4.726	4.373
12.	Laba / rugi Tahun Berjalan	81	(91)
	Pajak Tangguhan		
13.	Hak Minoritas -/-		
		746	(3.536)
14.	Saldo laba (rugi) awal tahun		
	Deviden -/-		
15.	Lainnya		
		5.553	746
16.	Saldo Laba (rugi) Akhir Periode		

Lampiran 7

PERHITUNGAN LABA-RUGI DAN SALDO LABA KONSOLIDASI

Periode 01 Januari s/d 31 Desember 2002 dan 2001

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	POS-POS	BANK	
		2002	2001
	<u>Pendapatan dan beban operasional</u>		
1.	Pendapatan Bunga		
	1.1. Hasil Bunga		
	a. Rupiah	69.253	47.063
	b. Valuta Asing		
	1.2. Provisi dan Komisi		
	a. Rupiah	1.528	1.024
	b. Valuta Asing		
	Jumlah Pendapatan Bunga	70.781	48.087
2.	Beban Bunga		
	2.1. Beban Bunga		
	a. Rupiah	47.488	30.460
	b. Valuta Asing		
	2.2. Komisi dan Provisi		
	Jumlah Beban Bunga -/-	47.488	30.460
	Pendapatan Bunga Bersih	23.293	17.627
3.	Pendapatan Operasional Lainnya.		
	3.1. Pendapatan Provisi, Komisi, fee	813	610
	3.2. Pendapatan transaksi valuta asing		
	3.3. Pendapatan kenaikan nilai surat berharga		
	3.4. Pendapatan Lainnya	609	359
	Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	1.422	969
4.	Beban (Pendapatan) Penghapusan Aktiva Produktif.	3.470	3.905
5.	Beban Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	13	16
6.	Beban Operasional lainnya.		
	6.1. Beban Administrasi dan umum	4.660	3.911
	6.2. Beban Personalia	6.136	4.634
	6.3. Beban penurunan nilai surat berharga		
	6.4. Beban Transaksi valas		
	6.5. Beban Lainnya	1.173	1.230
	Jumlah Beban Operasional Lainnya	11.969	9.775
	Laba (rugi) Operasional	9.263	4.900
	Pendapatan (Beban) Non Operasional		
7.	Pendapatan Non Operasional	233	183

8.	Beban Non Operasional	197	109
	Pendapatan (Beban) Non Operasional	36	74
9.	Pendapatan / beban Luar Biasa		
10.	Laba / rugi sebelum Pajak Penghasilan	9.299	4.974
11.	Taksiran pajak penghasilan -/-	3.112	248
		6.187	4.726
12.	Laba / rugi Tahun Berjalan	7	81
	Pajak Tangguhan		
13.	Hak Minoritas -/-		
		5.553	746
14.	Saldo laba (rugi) awal tahun		
	Deviden -/-		
15.	Lainnya		
16.	Saldo Laba (rugi) Akhir Periode	11.747	5.553

Lampiran 8

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI KONSOLIDASI

Tanggal 31 Desember 2001 dan 2000

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Bank	
		2001	2000
	<u>KOMITMEN</u>		
	<u>Tagihan Komitmen</u>		
1.	Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan		
	a. Rupiah	-	-
2.	b. Valuta Asing	-	-
	Lainnya	-	-
	Jumlah Tagihan Komitmen	-	-
1.	<u>Kewajiban Komitmen</u>		
	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
	a. Rupiah	49.510	37.074
2.	b. Valuta Asing	-	-
	Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka	-	-
3.	impor dan ekspor		
	Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Komitmen	49.510	37.074
		(49.510)	(37.074)
	JUMLAH KOMITMEN BERSIH		
1.	<u>KONTINJENSI</u>		
	<u>Tagihan Kontinjensi</u>		
	Garansi yang diterima		
2.	a. Rupiah		
	b. Valuta Asing		

	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Rupiah	14.270	9.735
3.	b. Valuta Asing		
	Lainnya		
	Jumlah Tagihan Kontinjensi	<u>14.270</u>	<u>9.735</u>
1.	<u>Kewajiban Kontinjensi</u>		
	Garansi yang diberikan		
	a. Bank Garansi		
	- Rupiah	15.125	15.449
	- Valuta Asing		
2.	b. Lainnya		
	Revocable L/C yang masih berjalan dalam rangka		
3.	impor dan ekspor		
	Lainnya		
	Jumlah Kewajiban Kontinjensi	<u>15.125</u>	<u>15.449</u>
	JUMLAH KEWAJIBAN KONTINJENSI	<u>(855)</u>	<u>(5.714)</u>

Lampiran 9

LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI KONSOLIDASI

Tanggal 31 Desember 2002 dan 2001

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Bank	
		2002	2001
	<u>KOMITMEN</u>		
	<u>Tagihan Komitmen</u>		
1.	Fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan		
	a. Rupiah	-	-
2.	b. Valuta Asing	-	-
	Lainnya	-	-
	Jumlah Tagihan Komitmen	-	-
1.	<u>Kewajiban Komitmen</u>		
	Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik		
	a. Rupiah	56.894	49.510
2.	b. Valuta Asing	-	-
	Irrevocable L/C yang masih berjalan dalam rangka	-	-
3.	impor dan ekspor		
	Lainnya	-	-
	Jumlah Kewajiban Komitmen	56.894	49.510
		(56.894)	(49.510)
	JUMLAH KOMITMEN BERSIH		
1.	<u>KONTINJENSI</u>		
	<u>Tagihan Kontinjensi</u>		
	Garansi yang diterima		
	a. Rupiah		
	b. Valuta Asing		

2.	Pendapatan bunga dalam penyelesaian		
	a. Rupiah	12.221	14.270
	b. Valuta Asing		
3.	Lainnya		
	Jumlah Tagihan Kontinjensi	<u>12.221</u>	<u>14.270</u>
	<u>Kewajiban Kontinjensi</u>		
1.	Garansi yang diberikan		
	a. Bank Garansi		
	- Rupiah	16.456	15.125
	- Valuta Asing		
	b. Lainnya		
2.	Revocable L/C yang masih berjalan dalam rangka impor dan ekspor		
3.	Lainnya		
	Jumlah Kewajiban Kontinjensi	<u>16.456</u>	<u>15.125</u>
	JUMLAH KEWAJIBAN KONTINJENSI	<u>(4.235)</u>	<u>(855)</u>

Lampiran 10

NERACA KONSOLIDASI
Tanggal 31 Desember 2001 dan 2000

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Bank		No	Pos-pos	Bank	
		2001	2000			2001	2000
	<u>AKTIVA</u>				<u>PASIVA</u>		
1.	Kas			1.	Giro		
2.	Penempatan pada Bank Indonesia	4.810	4.957	a.	Rupiah		
	a. Giro Bank Indonesia			b.	Valuta Asing	146.840	136.409
	b. Sertifikat Bank Indonesia	15.567	14.964	2.	Kewajiban segera lainnya	-	-
	c. Lainnya	10.535	22.922	3.	Tabungan	4.931	1.858
3.	Giro pada Bank lain	25.389	21.993	4.	Simpanan Berjangka	14.176	19.081
	a. Rupiah			a.	Rupiah		
	b. Valuta Asing	359	202	i.	Pihak terkait dengan Bank		
4.	Penempatan pada Bank lain	-	-	ii.	Pihak lain	50.533	34.003
	a. Rupiah			b.	Valuta Asing	83.770	54.982
	b. Valuta Asing	16.000	-	i.	Pihak terkait dengan Bank		
	PPAP – Surat berharga yang dimiliki	-	-	ii.	Pihak lain	-	-
5.	Surat Berharga yang dimiliki	(164)	(2)	5.	Sertifikat Deposito	-	-
	a. Rupiah			a.	Rupiah		

	a. Rupiah				b. Valuta Asing	-	-
	i. Diperdagangkan	-	-	6.	Simpanan dari bank lain	-	-
	ii. Tersedia untuk dijual	-	-	7.	Surat berharga yang dijual-		
	iii. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-		dengan-janji dibeli kembali		
	b. Valuta Asing				(repo)	-	-
	i. Diperdagangkan	-	-	8.	Kewajiban Derivatif	-	-
	ii. Tersedia untuk dijual	-	-	9.	Kewajiban Akseptasi	-	-
	iii. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	10.	Surat berharga yang diterbitkan		
	PPAP – Surat Berharga yang dimiliki	(777)	(924)		a. Rupiah	-	-
	-/-				b. Valuta Asing	-	-
6.	Obligasi Pemerintah	-	-	11.	Pinjaman yang diterima		
	i. Diperdagangkan	-	-		a. Fasilitas pendanaan jangka-		
	ii. Tersedia untuk dijual	-	-		pendek Bank Indonesia.	-	-
	iii. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-		b. Lainnya		
7.	Surat Berharga yang dibeli dengan-				i. Rupiah		
	janji dijual kembali -/- (reverse repo)				- Pihak terkait dengan-		
	a. Rupiah	-	-		Bank	-	-
	b. Valuta Asing	-	-		- Pihak lain	-	-
	PPAP – Surat Berharga yang dibeli-				ii. Valuta Asing		
	dengan janji dijual kembali -/-	-	-		- Pihak terkait dengan-		

8.	Tagihan Derivatif	-	-		Bank	-	-
	PPAP – Tagihan Derivatif -/-	-	-		- Pihak lain	-	-
9.	Kredit yang diberikan			12.	Estimasi kerugian Komitmen- dan- Kontinjensi	151	136
	a. Rupiah			13.	Kewajiban sewa guna usaha	-	-
	i. Pihak terkait dengan Bank	1.142	323	14.	Beban yang masih harus dibayar	2.359	1.854
	ii. Pihak lain	244.748	191.397	15.	Taksiran Pajak Penghasilan	-	-
	b. Valuta Asing			16.	Kewajiban Pajak Tangguhan	575	91
	i. Pihak terkait dengan Bank	-	-	17.	Kewajiban lain-lain	2.832	2.083
	ii. Pihak lain	-	-	18.	Pinjaman Subordinasi		
	PPAP – Kredit yang diberikan -/-	(8.249)	(4.379)		a. Pihak terkait dengan Bank	-	-
10.	Tagihan Akseptasi	-	-		b. Pihak lain	-	-
	PPAP – Tagihan Akseptasi -/-	-	-	19.	Modal Pinjaman		
11.	Penyertaan	-	-		a. Pihak terkait dengan Bank	-	-
	PPAP – Penyertaan -/-	-	-		b. Pihak lain	-	-
12.	Pendapatan yang masih akan- diterima	3.657	2.279	20.	Hak Minoritas	-	-
		841	574	21.	Ekuitas		
13.	Biaya dibayar dimuka	317	317		Modal disetor.	30.000	30.000
14.	Uang muka pajak	566	-		Agio (Disagio).	-	-
	Aktiva Pajak Tangguhan	6.973	5.545		Modal sumbangan.	-	-
15.	Aktiva Tetap	(3.796)	(3.280)				

16.	Akumulasi penyusutan aktiva tetap - /-	-	-	Selisih penjabaran laporan- keuangan.	-	-
17.	Aktiva sewa guna usaha Akumulasi penyusutan aktiva sewa- guna usaha -/-	-	-	Selisih penilaian kembali aktiva- tetap. Laba (rugi) belum direalisasi- dari surat berharga.	-	-
18.	Agunan yang diambil alih	18.006	20.233	Pendapatan komprehensif- lainnya.	-	-
19.	Aktiva lain-lain	5.796	4.122	Saldo laba (rugi)	5.553	746
	TOTAL AKTIVA	341.720	281.243	TOTAL PASIVA	341.720	281.243

Lampiran 11

NERACA KONSOLIDASI

Tanggal 31 Desember 2002 dan 2001

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Pos-pos	Bank		No	Pos-pos	Bank	
		2002	2001			2002	2001
	<u>AKTIVA</u>				<u>PASIVA</u>		
1.	Kas	7.166	4.810	1.	Giro		
2.	Penempatan pada Bank Indonesia				a. Rupiah	198.441	146.840
	a. Giro Bank Indonesia	24.607	15.567		b. Valuta Asing	-	-
	b. Sertifikat Bank Indonesia	21.990	10.535	2.	Kewajiban segera lainnya	5.103	4.931
	c. Lainnya	60.961	25.389	3.	Tabungan	17.194	14.176
3.	Giro pada Bank lain			4.	Simpanan Berjangka		
	a. Rupiah	500	359		a. Rupiah		
	b. Valuta Asing	-	-		i. Pihak terkait dengan Bank	43.747	50.533
4.	Penempatan pada Bank lain				ii. Pihak lain	139.764	83.770
	a. Rupiah	15.000	16.000		b. Valuta Asing		
	b. Valuta Asing	-	-		i. Pihak terkait dengan Bank	-	-
	PPAP – Surat berharga yang dimiliki	(155)	(164)		ii. Pihak lain	-	-
5.	Surat Berharga yang dimiliki			5.	Sertifikat Deposito		

	a. Rupiah				a. Rupiah	-	-
	i. Diperdagangkan	-	-		b. Valuta Asing	-	-
	ii. Tersedia untuk dijual	-	-	6. Simpanan dari bank lain		-	-
	iii. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	7. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo)		-	-
	b. Valuta Asing			8. Kewajiban Derivatif		-	-
	i. Diperdagangkan	-	-	9. Kewajiban Akseptasi		-	-
	ii. Tersedia untuk dijual	-	-	10. Surat berharga yang diterbitkan			
	iii. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	a. Rupiah		-	-
	PPAP- Surat Berharga yang dimiliki	-	(777)	b. Valuta Asing		-	-
6.	Obligasi Pemerintah			11. Pinjaman yang diterima			
	i. Diperdagangkan	-	-	a. Fasilitas pendanaan jangka pendek Bank Indonesia.		-	-
	ii. Tersedia untuk dijual	-	-	b. Lainnya			
	iii. Dimiliki hingga jatuh tempo	-	-	i. Rupiah			
7.	Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali -/- (reverse repo)			- Pihak terkait dengan Bank		-	-
	a. Rupiah	-	-	- Pihak lain		-	-
	b. Valuta Asing	-	-	ii. Valuta Asing			
	PPAP- Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali -/-	-	-	- Pihak terkait dengan Bank		-	-
8.	Tagihan Derivatif	-	-	- Pihak lain		-	-

	PPAP-Tagihan Derifatif -/-	-	-	12.	Estimasi kerugian Komitmen dan Kontinjensi	164	151
9.	Kredit yang diberikan			13.	Kewajiban sewa guna usaha		
	a. Rupiah			14.	Beban yang masih harus dibayar	-	-
	i. Pihak terkait dengan Bank	963	1.142	15.	Taksiran Pajak Panghasilan	2.648	2.359
	ii. Pihak lain	303.031	244.748	16.	Kewajiban Pajak Tangguhan	-	-
	b. Valuta Asing			17.	Kewajiban lain-lain	3	9
	i. Pihak terkait dengan Bank	-	-	18.	Pinjaman Subordinasi	2.750	2.832
	ii. Pihak lain	-	-		a. Pihak terkait dengan Bank		
	PPAP- Kredit yang diberikan -/-	(10.726)	(8.249)		b. Pihak lain	-	-
10.	Tagihan Akseptasi	-	-	19.	Modal Pinjaman	-	-
	PPAP-Tagihan Akseptasi -/-	-	-		a. Pihak terkait dengan Bank		
11.	Penyertaan	-	-		b. Pihak lain	-	-
	PPAP- Penyertaan -/-	-	-	20.	Hak Minoritas	-	-
12.	Pendapatan yang masih akan diterima	4.705	3.657	21.	Ekuitas	-	-
13.	Biaya dibayar dimuka	909	841		Modal disetor.		
14.	Uang muka pajak	-	317		Agio (Disagio).	30.000	30.000
15.	Aktiva Pajak Tangguhan	-	-		Modal sumbangan.	-	-
16.	Aktiva Tetap	9.111	6.973		Selisih penjabaran laporan-keuangan.	-	-
	Akumulasi penyusutan aktiva tetap-/-	(4.375)	(3.796)				
17.	Aktiva sewa guna usaha	-	-				

	Akumulasi penyusutan aktiva sewa-guna usaha -/-	-	-			-	-
18.	Agunan yang diambil alih	15.416	18.006			-	-
19.	Aktiva lain-lain	2.458	5.796			-	-
						11.747	5.553
	TOTAL AKTIVA	451.561	341.720		TOTAL PASIVA	451.561	341.720

Selisih penilaian kembali aktiva-tetap.
 Laba (rugi) belum direalisasi dari surat berharga.
 Pendapatan komprehensif lainnya.
 Saldo laba (rugi)

Lampiran 12

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Tanggal 31 Desember 2001 dan 2000

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	2001	2000
I. Komponen Modal		
A. Modal Inti		
1. Modal disetor	30.000	30.000
2. Cadangan tambahan modal (disclosed Reserves)	-	-
a. Agio saham	-	-
b. Disagio (-/-)	-	-
c. Modal Sumbangan	-	-
d. Cadangan umum dan tujuan	800	800
e. Laba tahun-tahun lalu setelah pajak	37	-
f. Rugi tahun-tahun lalu (-/-)	-	(4.336)
g. Laba tahun berjalan setelah pajak	2.363	2.187
h. Rugi tahun berjalan (-/-)	-	-
i. Selisih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri		
1. Selisih lebih	-	-
2. Selisih kurang (-/-)	-	-
j. Dana setoran modal	-	-
k. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)	-	-
3. Goodwill (-/-)		
B. Modal Pelengkap		
(Maksimal 100% dari modal inti)		
1. Cadangan revaluasi aktiva tetap	-	-
2. Cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif / PPAP (maks. 1,25% dari ATMR)	2.476	1.524
3. Modal Pinjaman	-	-

4. Pinjaman Subordinasi (maks. 50% dari modal-inti)	-	-
5. Peningkatan harga saham pada portofolio-tersedia untuk dijual (45%)	-	-
II. Total modal inti dan modal pelengkap (A+B)		
III. Penyertaan (-/-)	35.675	30.175
IV. Total modal (II – III)	-	-
V. Aktiva Tertimbang menurut risiko (ATMR)	35.675	30.175
VI. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang tersedia (IV : V)	304.596 11,71%	243.035 12,42%
VII. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	8%	4%

Lampiran 13

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Tanggal 31 Desember 2002 dan 2001

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	2002	2001
I. Komponen Modal		
A. Modal Inti	38.657	33.200
1. Modal disetor	30.000	30.000
2. Cadangan tambahan modal (disclosed Reserves)	8.657	3.200
a. Agio saham	-	-
b. Disagio (-/-)	-	-
c. Modal Sumbangan	-	-
d. Cadangan umum dan tujuan	950	800
e. Laba tahun-tahun lalu setelah pajak	4.613	37
f. Rugi tahun-tahun lalu (-/-)	-	-
g. Laba tahun berjalan setelah pajak	3.094	2.363
h. Rugi tahun berjalan (-/-)	-	-
i. Selisih penjabaran laporan keuangan kantor cabang luar negeri		
1. Selisih lebih	-	-
2. Selisih kurang (-/-)	-	-
j. Dana setoran modal	-	-
k. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio tersedia untuk dijual (-/-)	-	-
3. Goodwill (-/-)		
B. Modal Pelengkap		
(Maksimal 100% dari modal inti)		
1. Cadangan revaluasi aktiva tetap	-	-
2. Cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif / PPAP (maks. 1,25% dari ATMR)	3.016	2.476

3. Modal Pinjaman	-	-
4. Pinjaman Subordinasi (maks. 50% dari modal-inti)	-	-
5. Peningkatan harga saham pada portofolio-tersedia untuk dijual (45%)	-	-
II. Total modal inti dan modal pelengkap (A+B)	41.673	35.675
III. Penyertaan (-/-)	-	-
IV. Total modal (II – III)	41.673	35.675
V. Aktiva Tertimbang menurut risiko (ATMR)	361.056	304.596
VI. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang tersedia (IV : V)	11.54%	11.71%
VII. Rasio kewajiban penyediaan modal minimum yang diwajibkan	8%	8%

Lampiran 14

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2001 dan 2000

(Dalam Jutaan Rupiah)

Rasio	2001	2000
I. Permodalan		
1. CAR	11,71%	12,42%
2. Aktiva tetap terhadap modal	8,91%	7,51%
II. Aktiva Produktif		
1. Aktiva produktif bermasalah	7,58%	9,27%
2. NPL	8,22%	10,39%
3. PPAP terhadap aktiva produktif	2,94%	2,12%
4. Pemenuhan PPAP	100%	100%
III. Rentabilitas		
1. ROA	1,69%	1,86%
2. ROE	14,55%	16,02%
3. NIM	6,95%	6,62%
4. BOPO	90%	88,11%
IV. Likuiditas		
LDR	83,26%	78,55%
V. Kepatuhan (<i>compliance</i>)		
1. a. Persentase pelanggaran BMPK		
a.1. Pihak terkait		
a.2. Pihak tidak terkait		
b. persentase pelampauan BMPK		
b.1. Pihak terkait		
b.2. Pihak tidak terkait		
2. GWM Rupiah	5,29%	6,09%
3. PDN		

PERHITUNGAN RASIO KEUANGAN

Tanggal 31 Desember 2002 dan 2001

(Dalam Jutaan Rupiah)

Rasio	2002	2001
I. Permodalan		
1. CAR	11,54%	11,71%
2. Aktiva tetap terhadap modal	11,36%	8,91%
II. Aktiva Produktif		
1. Aktiva produktif bermasalah	3,49%	7,58%
2. NPL	4,81%	8,22%
3. PPAP terhadap aktiva produktif	2,63%	2,94%
4. Pemenuhan PPAP	100%	100%
III. Rentabilitas		
1. ROA	2,29%	1,69%
2. ROE	16,69%	14,55%
3. NIM	6,51%	6,96%
4. BOPO	87,17%	90%
IV. Likuiditas		
LDR	76,33%	83,26%
V. Kepatuhan (<i>compliance</i>)		
1. a. Persentase pelanggaran BMPK		
a.1. Pihak terkait		
a.2. Pihak tidak terkait		
b. persentase pelampauan BMPK		
b.1. Pihak terkait		
b.2. Pihak tidak terkait		
2. GWM Rupiah	6,10%	5,29%
3. PDN		

PENGGOLONGAN KUALITAS KREDIT

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998

	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Prospek usaha	Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang baik.	Industri atau kegiatan usaha memiliki potensi pertumbuhan yang terbatas.	Industri atau kegiatan usaha menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan.	Industri atau kegiatan usaha menurun.	Kelangsungan usaha sangat diragukan, Industri mengalami penurunan dan sulit untuk pulih kembali. Kemungkinan besar kegiatan usaha akan terhenti.
	Pasar yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.	Posisi di pasar baik, tidak banyak dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.	Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.	Pasar sangat dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian.	Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun.

	Persaingan yang terbatas, termasuk posisi yang kuat dalam pasar.	Pangsa pasar sebanding dengan pesaing.	Posisi di pasar cukup baik tetapi banyak pesaing, namun dapat pulih kembali jika melaksanakan strategi bisnis yang baru.	Persaingan usaha sangat ketat dan operasional perusahaan mengalami permasalahan yang serius.	
	Manajemen yang sangat baik.	Manajemen yang baik.	Manajemen cukup baik.	Manajemen kurang berpengalaman.	Manajemen sangat lemah.
	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan mendukung usaha.	Perusahaan afiliasi atau grup stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap debitur.	Hubungan dengan perusahaan afiliasi atau grup mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap debitur.	Perusahaan afiliasi atau grup telah memberikan dampak yang memberatkan debitur.	Perusahaan afiliasi sangat merugikan debitur.
	Tenaga kerja yang memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.	Tenaga kerja pada umumnya memadai dan belum pernah tercatat mengalami perselisihan atau pemogokan.	Tenaga kerja berlebihan namun hubungan pimpinan dan karyawan pada umumnya baik.		Terjadi pemogokan tenaga kerja yang sulit diatasi.

	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kondisi keuangan	Perolehan laba tinggi dan stabil.	Perolehan laba cukup baik namun memiliki potensi menurun.	Perolehan laba rendah.	Laba sangat kecil atau negatif. Kerugian operasional dibiayai dengan penjualan asset.	Mengalami kerugian yang besar. Debitur tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban dan kegiatan usaha tidak dapat dipertahankan.
	Permodalan kuat.	Permodalan cukup baik dan pemilik mempunyai kemampuan untuk memberikan modal tambahan apabila diperlukan.	Rasio utang terhadap modal cukup tinggi.	Rasio utang terhadap modal tinggi.	Rasio utang terhadap modal sangat tinggi.
	Likuiditas dan modal kerja kuat.	Likuiditas dan modal kerja umumnya baik.	Likuiditas kurang dan modal kerja terbatas.	Likuiditas sangat rendah.	Kesulitan Likuiditas.
	Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur dapat memenuhi	Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun debitur mampu memenuhi	Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur hanya mampu membayar bunga dan	Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayar pokok dan bunga.	Analisis arus kas menunjukkan bahwa debitur tidak mampu menutup biaya

Comment [pc1]:

	LANCAR	DALAM PERHATIAN KHUSUS	KURANG LANCAR	DIRAGUKAN	MACET
Kemampuan untuk membayar	Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan sera sesuai dengan persyaratan kredit.	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari. Jarang mengalami cerukan.	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari. Terdapat cerukan yang berulang kali khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.	Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari. Terjadi cerukan yang bersifat permanen khususnya untuk menutupi kerugian operasional dan kekurangan arus kas.	Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
	Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.	Hubungan debitur dengan bank baik dan debitur selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan masih akurat.	Hubungan debitur dengan bank memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya.	Hubungan debitur dengan bank semakin memburuk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya.	

	Dokumentasi kredit lengkap dan pengikat agunan kuat.	Dokumentasi kredit lengkap dan pengikat agunan kuat.	Dokumentasi kredit kurang lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.	Dokumentasi kredit yang tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah.	Dokumentasi kredit dan atau pengikatan agunan tidak ada.
		Pelanggaran perjanjian kredit yang tidak prinsipil.	Pelanggaran terhadap pokok persyaratan kredit.	Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.	
			Perpanjangan kredit untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.		